

***RENT-SEEKER* DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**  
**(Studi Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari**  
**Kabupaten Bulukumba)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S1)  
Strata Satu Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik pada  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARFANDI MANDALA

NIM. 30600113136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Rent-Seeker dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari Kab.Bulukumba)*” yang disusun oleh Arfandi Mandala, NIM: 30600113136, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, 16 November 2018 M, bertepatan dengan 16 Shafar – Rabi’ul-Awwal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).



Samata-Gowa 16 November 2018 M.

16 Shafar - Rabi’ul-Awwal 1440 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.Abdullah, M.Ag.	
Sekretaris	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si.	
Munaqisy I	: Prof.Dr.Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D.	
Munaqisy II	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.,	
Pembimbing I	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si.	
Pembimbing II	: Nur Aliyah Zainal, S.IP, M.A.	

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP. 19590704 1989031 1 003

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfandi Mandala

NIM : 30600113136

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul Skripsi : *Rent-Seeker* dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 16 November 2018  
Yang menyatakan

**Arfandi Mandala**  
**NIM:30600113072**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun masih banyak terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan seperlunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw, bersama seluruh keluarga dan para tabi'in-tabi'inya, serta rahmat dan hidayahnya semoga selalu tercurahkan kepada kita semua maupun kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam menjalankan perintah Allah swt, sampai akhir zaman. Penulisan skripsi ini yang berjudul: *Rent-Seeker* dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba) dalam hal ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini mengalami banyak kesulitan. Namun, berkat bantuan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghaturkan terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Burhan dg Nompo dan Ibunda Halija yang telah sabar mendidik penulis, menyayangi dan memberikan cinta kasihnya, serta memberikan kesempatan penulis bisa menempuh pendidikan Sarjana S1, serta Kakak Lidya Jayanti dan seluruh

Keluarga Besar H. Pandu beserta Keluarga Besar H.Syamsinah terima kasih atas doa dan kasih sayang serta motivasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan studi dan saat menyusun skripsi ini.

1. Prof.Dr.H.Musafir, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof.Dr.H.Muh.Natsir, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Dr. Tasmin, M.Ag., selaku Dekan I, Dr.Mahmuddin selaku Dekan II, serta Dr.Abdullah, M.Ag., selaku Dekan III.
3. Syahrir Karim, M.Si, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si., selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik.
4. Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si, selaku pembimbing I, dan Nur Aliyah Zainal, S.IP, M.A., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, petunjuk, nasehat dan motivasi selama melakukan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D, Selaku Penguji I dan Syahrir Karim,M.Si, Ph.D., Selaku Penguji II yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat, petunjuk dan motivasi selama melakukan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Jajaran dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah membimbing dan memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
7. Staf dan Tata Usaha dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.

8. Teman-teman jurusan Ilmu Politik yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, dan Sahabat Andi Riska Andriani, Muh.Irfan, Muh.Ilyas dan Ananda Rezky Wibowo, yang selalu memberikan bantuan, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan studi ini, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah.

Gowa, 16 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Arfandi Mandala  
NIM:30600113136

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1-8
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8-9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	9-11
F. Tinjauan Karya Terdahulu.....	11-16

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Teori .....	
1. Teori Kekuasaan .....	17-20
2. Teori <i>Rent-Seeking</i> .....	20-24
3. Teori Politik Pembangunan .....	24-33
B. Kerangka Konseptual .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35-37

D. Teknik Pengumpulan Data .....	37-39
E. Teknik Penentuan Informan .....	39-40
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	40-42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43-50
B. Masalah Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari .....	50-59
C. Pola Rent-Seeking Dalam Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari .....	60-64
1) Pelelangan Umum .....	64-72
2) Sistem Lump Sum dalam Kontrak Pembangunan .....	72-77
3) Lambatnya Proses Hukum .....	77-81
D. Dampak Praktek Rent-Seeking .....	
1) Dampak Bagi Pedagang .....	81-85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	86-87
B. Implikasi .....	87-88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89-90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87-95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>



## ABSTRAK

**Nama : Arfandi Mandala**  
**NIM : 30600113136**  
**Jurusan : Ilmu Politik**  
**Judul : *Rent-Seeker* dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba)**

---

Skripsi ini mengkaji tentang *rent-seeker* dalam pembangunan infrastruktur Pasar Rakyat Bonto Bahari. Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktek *rent-seeking* pada pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola *rent-seeking* dalam proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari dan untuk mengetahui dampak praktek *rent-seeking* terhadap pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kekuasaan, teori *rent-seeking*, dan teori politik pembangunan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Waktu pelaksanaannya memakan waktu selama tiga bulan. Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumenter. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball*. Analisis data yang digunakan disebut dengan *interactive model*, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari terdapat praktek *rent-seeking* dengan menggunakan pola relasi kuasa dan bisnis dalam pelelangan umum, yang di tunjukkan dengan adanya kerja sama pengusaha dan politisi untuk memenangkan tender proyek. Praktek *rent-seeking* mengakibatkan anggaran pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari menjadi tidak efektif karena menimbulkan beberapa kegagalan konstruksi pada pekerjaan dinding pasar yang mengalami keretakan, saluran drainase yang tidak ideal dan tinggi pondasi yang lebih rendah dari pada jalan, sehingga dapat merugikan pedagang pasar karena dengan kondisi bangunan yang demikian membuat area pasar mudah terkena banjir dan mengganggu kenyamanan dalam transaksi jual beli.

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu politik khususnya kajian Politik Pembangunan yang terjadi di daerah agar fenomena yang ditemukan oleh peneliti terus dikembangkan sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat yang tidak hanya dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi saja, namun juga termasuk di dalamnya terdapat perubahan mental, sosial, struktur, hingga kultur dalam masyarakat. Setiap proses pembangunan seharusnya memiliki tiga tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; peningkatan standar hidup; serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial<sup>1</sup>. Salah satu upaya dalam pencapaian tujuan-tujuan inti pembangunan adalah dengan pelaksanaan pembangunan daerah dan yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana pemimpin bisa menyelenggarakan pembangunan secara adil dan merata sesuai dengan proporsinya masing-masing di setiap wilayah dan daerah yang di pimpinnya.

Maka dari itu, pada umumnya manusia harus memiliki sikap jujur dan menjauhi yang namanya perilaku dusta agar setiap urusan duniawi bisa terselenggara dengan baik, terlebih jika itu menyangkut tentang kepentingan banyak orang, para pemimpin atau pembuat kebijakan mesti memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai ajaran Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ  
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ  
بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى  
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ

---

<sup>1</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1, Edisi 9. Haris Munandar, penerjemah. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). Terjemahan dari *Economic Development*, h. 28-29

الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ ح  
و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي  
حَدِيثِ عِيسَى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ حَتَّى يُكْتَبَهُ اللَّهُ ٢

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Syaqq dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.'" Telah menceritakan kepada kami Minjab bin Al-Haris Al-Tamimi; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mushir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus keduanya dari Al-A'masy melalui jalur ini. Namun di dalam Hadis Isa tidak disebutkan lafazh; 'memelihara kejujuran dan memelihara kedustaan.' Sedangkan di dalam Hadis Ibnu Mushir disebutkan dengan lafal *Hatta yuktahullah*. (hingga Allah mencatatnya sebagai pendusta).

Penjelasan hadis di atas kita dapat memetik inti sari tentang himbauan kepada seluruh umat manusia agar menanamkan sikap jujur dan menjauhi yang namanya perilaku dusta, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan di akhirat, setelah kita meninggalkan dunia.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

<sup>2</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abual-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 4 (Cet. V; Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi), h. 2013. Lihat juga Muhammad Mahyu al-Din 'Abd al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, Juz 4 (Cet. IV; Beirut: Maktabah al-'Asriyah), h. 297.

memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga memberikan keleluasaan serta kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.<sup>3</sup>

Perubahan paradigma sesuai dengan dasar pemikiran dari kedua undang-undang di atas yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah menjadi kewenangan daerah, termasuk juga penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. Namun persiapan bagi daerah sendiri memerlukan waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri terhadap tatanan yang sesuai dengan paradigma baru tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu : (1) faktor manusia, (2) faktor keuangan, (3) faktor peralatan, (4) faktor organisasi dan manajemen, inilah yang harus dipersiapkan oleh daerah secara cermat dan terencana.<sup>4</sup>

Salah satu yang mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan dilakukannya berbagai pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur ekonomi/fisik; seperti bandara, kereta api, pelabuhan, perlistrikan, jalan raya, jalan tol, taman, penyediaan air bersih, tanggul, pasar/pusat perbelanjaan dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga melibatkan sektor swasta.

---

<sup>3</sup>Departemen Keuangan, Diakses di <http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=341> pada 3 Oktober 2017 pukul 20.32 WITA

<sup>4</sup>Josef Riwu, Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa), h.34-36.

Pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta lebih efisien dibanding pemerintah. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 membuktikan betapa swasta Indonesia ternyata lebih rapuh dibanding pemerintah. Banyak perusahaan swasta besar jatuh dihantam krisis. Hutang sektor swasta yang sangat besar menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Akibatnya hampir 70 persen perusahaan swasta besar tak mampu lagi menjalankan roda usahanya. Konsep *good governance* yang memadukan pendekatan berorientasi pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan *civil society* melalui demokratisasi kemudian diyakini sebagai solusi untuk keluar dari krisis.<sup>5</sup>

Konsep *good governance* itu bisa terwujud bila sektor swasta, selaku salah satu pilar pendukungnya, memiliki sifat kompetitif, otonom, dan bebas dari ketergantungan atas pemerintah. Sedangkan fenomena yang terjadi di Indonesia justru memperlihatkan gejala yang sebaliknya. Berbagai praktek konspirasi antara pengusaha dan penguasa tumbuh subur terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi " demi kepentingan nasional", padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan ekonomi.<sup>6</sup> Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang larangan menyalahgunakan harta yang bukan hak kita. Sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup>Syamsul Ma'arif, "*Rent Seeking Behaviour*", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol.II, 2014.

<sup>6</sup>Syamsul Ma'arif, *Rent Seeking Behaviour*, h. 264

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>7</sup>

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.<sup>8</sup>Sehubungan dengan ayat tersebut, terdapat juga dalam QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quranulkarim wa Tafsiruhu*, Departemen Agama RI, 2009. h.

<sup>8</sup>Abdullah bin Muhammad bin Ishak Ali As-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, penterjemah Ust. Farid Ahmad Okbah, MA, dkk. (Denpasar: Pustaka Imam As-Syafi'i)

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya, Allah Swt, melarang hamban-hambanNya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka tas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memkai cara ytang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya patra pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadipada kebanyakannya. Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Musannah, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu, lelaki pertama mengatakan, "jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan kukembalikan berikut dengan satu dirham. Ibnu Abbas mengatakan, bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. Di dalam firman-Nya.<sup>10</sup>

Gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan istilah perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*) Perilaku semacam ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Praktek *rent seeking behaviour* di Indonesia ditandai oleh sejumlah ciri utama, yaitu: pertama, maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan "instan" (*highly*

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quranulkarim wa Tafsiruhu*, Departemen Agama RI, 2009. h.83

<sup>10</sup>Ali bin Abi Thalbah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.82 <http://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/3264>



*leveraged firm*) tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar; dan kedua, utang luar negeri swasta dalam skala nasional yang semula kecil tiba-tiba membengkak sangat besar sejak 1990-an dan kemudian bahkan melebihi utang pemerintah. ini berarti sebagian besar penyebab krisis bersumber dari perilaku para aktor di negeri ini.<sup>11</sup>

Rente atau sewa ekonomoi atas faktor produksi tertentu sebagai kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut.<sup>12</sup> Perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar (*barrier to entry*) dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti (substitusi), akan dapat menikmati laba super normal atau rente yang lebih tinggi. Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha memberikan imbalan, baik berupa uang tunai maupun "hadiah". Dalam literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya juga disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan "imbalan" atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).<sup>13</sup>

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulukumba, menjadi titik fokus Skripsi ini, terutama dalam hal pembangunan di sektor publik salah satunya adalah pembangunan pasar tradisional. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Pasar Bonto Bahari. Pada observasi awal yang peneliti lakukan, Pelaksana

---

<sup>11</sup>Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik Kelembagaan: Mencari Jawaban Atas Krisis Ekonomi dan Politik*, dalam *Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol 4(3): h. 11-23

<sup>12</sup>Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.59.

<sup>13</sup>Deliarnov, *Ekonomi Politik*, h.60.



Tugas (PLT) Inspektorat Kabupaten Bulukumba, mengemukakan adanya temuan pada pembangunan Pasar Tradisional Bonto Bahari. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan langsung oleh Tim Inspektorat didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, dengan hasil adanya beberapa bagian bangunan yang tidak layak dan harus diperbaiki serta adanya pembangunan yang justru tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor. Hasil temuan tersebut juga telah diserahkan ke bagian hukum untuk diteliti. Pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga telah melaporkan ke Bupati Bulukumba.<sup>14</sup>

Tahun 2016 lalu, Pasar Bonto Bahari dibangun dengan anggaran Rp5,6 miliar dari APBN, namun mengalami kerusakan sebelum difungsikan. Hal tersebut menuai protes masyarakat Bonto Bahari beberapa waktu lalu. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana pola *rent-seeking* dalam proyek pembangunan pasar tradisional Bonto Bahari.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pola *rent-seeking* dalam proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari?
- b. Bagaimana dampak praktek *rent-seeking* terhadap pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui pola *rent-seeking* dalam proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.

---

<sup>14</sup><http://rakyatku.com/tag/pemkab-bulukumba/?url=63103/2017/08/28/inspektorat-bulukumba-teukan-pembangunan-pasar-bonto-bahari-bermasalah>

- b. Untuk mengetahui Dampak Praktek *Rent-seeking* terhadap Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah, mengasah ketajaman berpikir dalam analisis, serta menambah pengetahuan tentang pola dan dampak praktek *rent-seeking* dalam pembangunan dan mengetahui relevansi teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dan kondisi dimasyarakat. Serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan kelak, jika menemukan hal yang ada kaitannya dengan praktek *rent-seeking*.

2. Praktis

Sebagai syarat meraih gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa dan yang lainnya. Serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan kelak, jika menemukan hal yang ada kaitannya dengan praktek *rent-seeking*.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Penelitian ini berusaha memahami pola *rent-seeking* pada pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari dan dampak praktek *rent-seeking* terhadap pedagang pasar. Teori ekonomi perburuan rente (*rent seeking economic theory*) menjelaskan

hubungan pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha selalu mencari preferensi atau keistimewaan dari pemerintah dalam bentuk lisensi, kemudahan, proteksi, dan sebagainya untuk kepentingannya<sup>15</sup>.

Pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya.<sup>16</sup> Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka *rent-seeking* tidak dimaknai secara netral, tapi dilihat melalui kaca mata yang negatif.

Asumsi awalnya adalah setiap kelompok kepentingan (*self interest*) berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Persoalannya adalah, jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul bisa sangat besar. Seperti yang diungkap oleh Olson, proses lobi dapat berdampak kolosal karena melibatkan proses pengambilan keputusan (*decision making*) berjalan sangat lambat dan ekonomi akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru<sup>17</sup>. Kelompok kepentingan ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari rente (*rent-seeking*) melalui proses politik dengan memengaruhi kebijakan. Dengan adanya praktek perburuan rente yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah hanya menghasilkan inefisiensi.

Pola *Rent-seeking* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk atau struktur apa saja yang memungkinkan terjadinya pemburuan rente.

---

<sup>15</sup>Yustika A.E, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*,h.38.

<sup>16</sup>Aidt, *Economics Analysis of Corruption: The Economic Journal*, Vol. 113 No. 491, November 2003, h. 2.

<sup>17</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi* (Jatim: Bayumedia Publishing, 2008), h. 14.

Perilaku mencari rente (*rent seeking behavior*) merupakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan berbagai hambatan (retribusi) melalui regulasi sehingga orang per orang harus bersaing untuk mendapatkan rente tersebut. Kadang-kadang bentuk persaingan untuk mendapatkan rente tersebut sangat legal , tetapi juga dapat dalam bentuk-bentuk lain, seperti penyuapan, korupsi, penyeludupan dan pasar gelap<sup>18</sup>. Sedangkan definisi lain pencarian rente sebagai usaha dengan menggunakan proses politik (*political process*) sedemikian sehingga mengizinkan perusahaan atau kelompok perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang melebihi biaya imbalan (*opportunity cost*)-nya<sup>19</sup>.

*Rent-seeking* atau Pemburuan sewa selalu dilatarbelakangi oleh motif ingin meraih keuntungan yang lebih banyak dari keuntungan yang seharusnya, Sehingga penelitian ini terfokus untuk memahami pola *rent-seeking* dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari dan dampak yang ditimbulkan bagi pedagang akibat adanya praktek *rent-seeking*. Pedagang yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai usaha di pasar Rakyat Bonto Bahari, baik yang menggunakan los, kios dan pelataran pasar.

#### **F. Tinjauan Karya Terdahulu**

Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dimaksud dengan tujuan untuk menghindari duplikasi disamping itu menunjukkan bahwa objek yang diteliti yaitu formulasi kebijakan pertambangan dalam perspektif politik lingkungan masih jarang kita jumpai.

---

<sup>18</sup>Riyanto, “Korupsi Dalam Pembangunan Ekono<sup>o</sup> Wilyah: Suatu Kajuan Ekonomi Politik dan Budaya”, Disertasi (Bogor: IPB, 2008), h.14.

<sup>19</sup>Riyanto, “Korupsi Dalam Pembangunan Ekono<sup>o</sup> Wilyah: Suatu Kajuan Ekonomi Politik dan Budaya”,.h.15.

Tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada.<sup>20</sup>

Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dan mendukung penelitian ini adalah :

1. Ilham Nuryanto, dalam skripsi yang berjudul “Perburuan Rente dan Korupsi Pada Sektor Properti Di Kabupaten Bogor”. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Properti merupakan salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun pada prosesnya, seringkali terdapat penyimpangan yang terjadi pada proses-proses sebelum maupun sesudah pembangunan properti dilakukan yang berakibat pada kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perburuan rente, biaya-biaya transaksi dan korupsi, serta potensi pembangunan yang hilang pada pembebasan lahan maupun pembangunan properti di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis menggunakan analisis ekonomi politik, analisis biaya transaksi, analisis korupsi dan perburuan rente, dan analisis kebocoran (ICOR), lalu disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembang properti melakukan aktivitas perburuan rente dengan berkolusi dengan oknum pemerintah, calo, dan preman agar dimudahkan dalam proses perizinan penguasaan lahan. Akibat dari aktivitas perburuan rente yang dilakukan oleh pengembang maupun oknum pemerintah yang berujung korupsi menyebabkan munculnya kebocoran sebesar 449 miliar per tahun menyebabkan potensi tersebut hilang sebesar 13.13%.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Alvabeta, 2008). h.12.

<sup>21</sup>Ilham Nuryanto, “Perburuan Rente dan Korupsi Pada Sektor Properti Di Kabupaten Bogor”, *Skripsi* (Bogor :Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2016).

Penelitian ini sama-sama membahas tentang *rent-seeking* akan tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan yang ingin dilakukan peneliti yaitu tidak hanya terfokus pada pola *rent-seeking* dalam proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, tetapi juga mengenai dampak yang ditimbulkan dari praktek *rent-seeking* tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini akan sangat membantu penulis untuk melakukan observasi awal tentang *rent-seeking*.

2. Emma P Sijabat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara DISPERINDAG Kab.Asahan Dengan PT.Menara Kharisma Internusa Medan” (Study Pada Proyek Pembangunan Pasar Kartini Kisaran). Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan Negara. Dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut, Pemerintah sebagai pengguna jasa harus bekerja sama dalam suatu hubungan kontrsktual dengan pihak swasta sebagai kontraktor (penyedia jasa). Hubungan kerja sama tersebut dibuat dalam satu perjanjian yang disebut dengan kontrak konstruksi. Skripsi ini akan membahas: “Tinjauan Yuridis tentang Kontrak Konstruksi Antara Disperindag Kab. Asahan Dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan(Study pada Proyek Pembangunan Pasar KartiniKisaran)”. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses pemilihan pihak penyedia jasa, tanggung jawab para pihak dan apa saja yang hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan dan mengelolah data sekunder.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Emma P Sijabat, “Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara DISPERINDAG Kab.Asahan Dengan PT.Menara Kharisma Internusa Medan (Studi Pada Proyek Pembangunan Pasar Kartini Kisaran)”, *Skripsi* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2014).

Berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu ingin terfokus pada bagaimanapraktek *rent-seeking* dalam proyek pembangunan pasar tradisional Bonto Bahari dalam perspektif ekonomi politik sedangkan skripsi ini menggunakan analisis yuridis. Meskipun demikian, skripsi ini sangat membantu penulis dalam penelitian karena dapat membantu penulis melihat dari perspektif hukum.

3. Indra Wijaya, dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Dampak Pedagang Dari Proyek Pembangunan Pasar Ngarsopuro”.Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif yang menggunakan metode evaluasi. Penelitian ini mengevaluasi dampak dari proyek pembangunan Pasar Ngarsopuro secara sosial terhadap para pedagang. Peneliti mengartikan dampak secara sosial berupa dampak interaksi sosial antar pedagang, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengevaluasi dampak interaksi sosial antar pedagang dari pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Ngarsopuro.<sup>23</sup>

Dalam skripsi tersebut, penulisnya menitik fokuskan peneltiannya terhadap dampak sosial yang dialami pedagang atas proyek pembangunan pasar Ngarsopuro, penelitian ini bersifat evaluatif sehingga berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan dengan fokus pada pola prakek *rent-seeking* yang terjadi pada proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari dengan mengacu pada temuan Badan Pemerika Keuangan Daerah (BPK) Kab.Bulukumba dan meneliti tentang bagaimana Dampak dari pembangunan pasar terhadap pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari, namun skripsi di atas dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan di lakukan karena sama-sama menyangkut tentang *rent-seeking*.

---

<sup>23</sup>Indra Wijaya, “Evaluasi Dampak Pedagang Dari Proyek Pembangunan Pasar Ngarsopuro”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010).



4. Nova Sulastri, dalam skripsi yang berjudul ‘Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna’. Program Studi Keuangan Daerah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Dibimbing oleh: 1) Manat Rahim 2) La Tondi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.<sup>24</sup>

Dalam skripsi di atas penulis bertujuan untuk mengetahui efektivitas alokasi dana desa untuk pembangunan fisik di desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih fokus untuk mengetahui praktek *rent-seeking* dalam proyek pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari dengan mengacu pada temuan Badan pemeriksa Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, akan tetapi skripsi di atas juga membahas mengenai efektifitas alokasi anggaran pembangunan fisik desa, dan hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena juga

---

<sup>24</sup>Nova Sulastri, 2016: Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi S1*, Program Studi Keuangan Daerah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo.



membahas mengenai anggaran pembangunan dan pemanfaatannya, maka dari itu skripsi tersebut dapat bermanfaat dalam penelitian yang akan di lakukan.

5. Muhammad Nalar Al Khair, dalam skripsi yang berjudul ‘‘Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Putusan *Incracth* Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemerintah 2005-2013)’’. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di indonesia karena berdampak buruk terutama pada perekonomian. Pihak KPK mengatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi dari 2004 sampai 2011 mencapai Rp 39.3 triliun. Penelitian ini menganalisis mengenai pola korupsi di lembaga pemerintah indonesia dengan melihat 49 kasus tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan *incracht* dari tahun 2005 sampai 2013 agar kedepannya pemerintah tahu bagaimana mengatasi dan mencegah korupsi di indonesia setelah mengetahui pola yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk melihat pola korupsi dengan mengacu kepada teori *Principal Agent* serta *benefit cost ratio* untuk melihat kecenderungan orang yang bekerja di lembaga pemerintah untuk melakukan korupsi. Penelitian ini menggunakan 3 bentuk pola korupsi yaitu: *Mercenary Abuse Of Power*, *Discretinery Abuse Of Power*, *Ideological Abuse Of Power*.<sup>25</sup>

Berbeda dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu ingin mengetahui pola dan dampak praktek *rent-seeking* dalam proyek pembangunan pasar Bonto Bahari, dengan mengacu pada temuan Badan pemeriksa Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, akan tetapi skripsi di atas membahas mengenai pola korupsinya saja, meskipun demikian skripsi tersebut dapat bermanfaat dalam penelitian yang akan di lakukan.

---

<sup>25</sup>Muhammad Nalar Al Khair, dalam skripsi yang berjudul ‘‘Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Putusan *Incracth* Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemerintah 2005-2013)’’

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. Teori

Teori merupakan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, sebagai alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, suatu teori kadang kala tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karenanya melalui suatu penelitian teori tersebut dipertajam, diperkuat atau bahkan sebaliknya dibantah dengan kenyataan atau fenomena.<sup>26</sup> Untuk itu, perlu untuk menggunakan varian teori yang beragam untuk mengetahui praktek *rent-seeking* dalam proyek pembangunan pasar tradisional Bonto Bahari.

##### a) Teori Kekuasaan

Pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak-pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi<sup>27</sup>

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Pemimpin sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan diam tanpa berfikir rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa

---

<sup>26</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* ( Jakarta; Kencana.2010), h. 45.

<sup>27</sup>Efriza, *Kekuasaan Politik*, ( Malang; Intrans Publishing, 2016), h. 41

mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.<sup>28</sup> Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.<sup>29</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

---

<sup>28</sup>A. Hoogerwerf, h. 144-146.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; Rajawali pers, 1994), h. 265.

Terdapat bermacam-macam konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, seperti: (1) *Authority* (wewenang/kewibawaan), menurut Harold Laswell kekuasaan contohnya dapat didefenisikan sebagai otoritas dan kontrol; tingkat tertinggi dalam otoritas adalah kedaulatan. Ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara juga dapat disebut otoritas atau wewenang. (2) *Control*, Alfred de Grazia misalnya memberikan batasan, kekuasaan dapat didefenisikan kurang lebihnya sebagai kontrol atas disposisi hal-hal yang bernilai jabatan di pemerintah, bahan-bahan materi, kehormatan, dsb. (3) *Capacity* menurut Talcott Parsons, “produk” dari pemerintahan sebagai suatu sistem dinamakan kekuasaan, yang akan didefenisikan sebagai kapasitas umum dari suatu sistem sosial untuk dapat dilakukan sebagai kepentingan tujuan bersama. (4) *Process*, ini sebagai rangkaian perebutan/kejadian merupakan *effort* atau upaya. Roy Marcidis memandang kekuasaan sebagai upaya untuk mengontrol atau mempengaruhi perilaku orang lain. (5) *Influence* (pengaruh) merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. (6) Manipulasi, merupakan penggunaan dari pengaruh, dimana yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. (7) *Coercion* (paksaan), merupakan peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. (8) Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. (9)

*Acquiescence* atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal, atau sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes. (10) Benda, dimana kekuasaan seolah-olah diartikan seperti sebuah benda yang ingin dihimpun sebanyak-banyaknya.<sup>30</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut terdapat banyak perwujudan dari sebuah kekuasaan. Menurut Flechteim, kekuasaan politik sebagai suatu kapasitas, hubungan, dan proses yang sukar untuk dipahami dan banyak dihadapi, kadang terbuka kadang tersembunyi. Bisa merupakan serang keras atau bisa juga membujuk dengan suara yang menyejukan.<sup>31</sup>

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur seperti pasar/pusat perbelanjaan itu wujudkan melalui proses politik yang syarat akan kekuasaan, dimana didalamnya terdapat pemerintah dan pengusaha, sehingga dalam penelitian ini teori kekuasaan dapat digunakan untuk menganalisis mengenai peran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya pada proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.

#### ***b) Teori Rent-Seeking***

Awal dimulainya studi tentang perilaku memburu rente ini terjadi ketika tiga orang ekonom dari Amerika Serikat menerbitkan artikel masing-masing dalam tiga jurnal ilmiah yang berbeda. Gordon Tullock adalah ekonom pertama yang menerbitkan artikelnya berjudul

---

<sup>30</sup>Efriza, *Kekuasaan Politik*, (Malang; Intrans Publishing, 2016), h. 16-19.

<sup>31</sup>The Liang Gie, *Ilmu Politik Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan, dan Metodologi* (Yogyakarta; Fakultas Sosial dan Politik UGM, 1970), h. 14.

*“Welfare Costs of Tariffs, Monopoly, and Theft”* dalam *Western Economic Journal* (sekarang bernama *Economic Inquiry*) pada tahun 1967. Kemudian, Anne O Krueger adalah ekonom kedua yang menulis paper berjudul *“The Political Economy of the Rent-Seeking Society”* dalam *American Economic Review* pada tahun 1974.

Ada tiga kondisi dibawah ini yang mendorong terjadinya korupsi: 1. Kekuasaan atau otoritas yang diskretif. Artinya, pejabat publik memiliki wewenang, baik legal maupun tidak untuk menentukan bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan dijalankan. 2. Potensi bagi terciptanya rente ekonomi. 3. Institusi yang lemah. Tanpa adanya sanksi, pengawasan dan penegakan aturan yang ketat dan konsisten, maka rente ekonomi bukan hanya sekedar potensi, tapi akan terealisasi. Istilah rente dalam ekonomi politik yang digunakan pada penelitian ini bermakna negatif, walaupun sesungguhnya kata rente atau sewa dapat dimaknai secara netral. Menurut Adam Smith, sewa adalah salah satu balas jasa faktor produksi. Upah adalah balas jasa untuk tenaga kerja, keuntungan bagi pengusaha, sementara rente adalah balas jasa bagi aset, seperti bunga pinjaman, sewa tanah atau bangunan.

Oleh karena itu, konsep *rent-seeking* dalam ekonomi klasik tidak dimaknai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian, bahkan bisa berarti positif karena dapat mendorong kegiatan ekonomi secara simultan, seperti seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk

kepentingannya. Maka *rent-seeking* tidaklah dimaknai secara netral, tapi dilihat melalui kacamata yang negatif.<sup>32</sup>

Asumsi awalnya adalah setiap kelompok kepentingan (*self interest*) berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Persoalannya adalah, jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul bisa sangat besar. Seperti yang diungkap oleh Olson, proses lobi dapat berdampak kolosal karena melibatkan proses pengambilan keputusan (*decision making*) berjalan sangat lambat dan ekonomi akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru<sup>33</sup>. Kelompok kepentingan ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari rente (*rent-seeking*) melalui proses politik dengan memengaruhi kebijakan. Dengan adanya praktek perburuan rente yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah hanya menghasilkan inefisiensi. Hal tersebut mencerminkan tidak bertemunya kepentingan para pelaku, yaitu masyarakat dan pemerintah (politisi dan birokrat).

Teori ekonomi perburuan rente (*rent seeking economic theory*) menjelaskan hubungan pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha selalu mencari preferensi atau keistimewaan dari pemerintah dalam bentuk lisensi, kemudahan, proteksi, dan sebagainya untuk kepentingannya<sup>34</sup>. Pada pemerintahan Orde Baru, kegiatan *rent-seeking* dapat ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta itu sebagian besar dikuasai oleh mereka yang mempunyai hubungan pribadi dengan khusus dengan elite pemerintah, dan dalam

---

<sup>32</sup>Toke S. Aidt, *Economics Analysis of Corruption: The Economic Journal*, Vol. 113 No. 491, November 2003, h. 2.

<sup>33</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi* (Jatim: Bayumedia Publishing, 2008), h. 14.

<sup>34</sup>Yustika A.E, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*, h.38.

banyak kasus dengan Soeharto. Dengan fasilitas tersebut mereka sekaligus memperoleh dua keuntungan: mendapatkan laba yang berlebih (supernormal profit) dan mencegah pesaing masuk pasar<sup>35</sup>. Dengan lisensi khusus tersebut, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku perburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku antipersaingan atau menghindari persaingan. Perburuan rente (*rent-seeking*) dapat didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumberdaya yang dimiliki<sup>36</sup>.

Perilaku mencari rente (*rent seeking behavior*) merupakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan berbagai hambatan (retribusi) melalui regulasi sehingga orang per orang harus bersaing untuk mendapatkan rente tersebut. Kadang-kadang bentuk persaingan untuk mendapatkan rente tersebut sangat legal, tetapi juga dapat dalam bentuk-bentuk lain, seperti penyuapan, korupsi, penyeludupan dan pasar gelap<sup>37</sup>. Sedangkan definisi lain pencarian rente sebagai usaha dengan menggunakan proses politik (*political process*) sedemikian sehingga mengizinkan perusahaan atau kelompok perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang melebihi biaya imbalan (*opportunity cost*)-nya<sup>38</sup>.

Dari berbagai pemaparan dan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perburuan rente (*rent-seeking*) adalah usaha individu/kelompok kepentingan memengaruhi proses politik (*political process*) untuk memperoleh rente ekonomi/keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya (laba

---

<sup>35</sup>Yustika A.E, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*(Jatim: Bayumedia Publishing, 2008), h. 141.

<sup>36</sup>Yustika A.E, h. 141

<sup>37</sup>Riyanto, "Korupsi Dalam Pembangunan Ekono Wilyah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya", *Disertasi*(Bogor: IPB, 2008), h.14.

<sup>38</sup>Riyanto, h.15.



berlebih/supernormal profit) dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Dimana sumber rente adalah kekuatan monopoli/wewenang yang diperoleh dari pemerintah.

Prakek *rent-seking* memiliki pola yang berbeda-beda dalam penerapannya, sehingga dengan menggunakan teori *rent-seeking* peneliti dapat menganalisis praktek *rent-seeking* yang terjadi dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari untuk mengetahui pola praktek *rent-seeking* yang diterapkan, mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola *rent-seeking*, sehingga peneliti terlebih dahulu mesti memahami apa yang dimaksud dengan praktek *rent-seeking*.

### **c).Teori Politik Pembangunan**

Ditinjau dari segi bahasa, pembangunan adalah terjemahan dari bahasa Indonesia dari bahasa inggris, *development*. Kata *development* diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan disesuaikan dengan bahasa lokal. Masyarakat Filipina menerjemahkan *development* sebagai sesuatu yang bersifat local. Misalnya untuk bahasa Tagalog, *development* diterjemahkan sebagai *pang-unlad*. Adapun dalam bahasa illongo diterjemahkan dengan *pag-uswang* dan dalam bahasa Ilocano diterjemahkan menjadi *progreso*. Secara fundamental berasal dari ilmu biologi yang menumpuhkan pada lahir, tumbuh, dan berkembang kemudian mati. Namun demikian, perkembangan selanjutnya justru telah digunakan dalam ilmu-ilmu sosiologi, ekonomi, politik, dan kadang juga seni. Bervariasinya penggunaan konsep pembangunan tergantung penjelasan dan pendekatan yang digunakan.<sup>39</sup>

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Sering kali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan

---

<sup>39</sup> Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*.(Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 90

materil. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi. Bukan hanya itu saja, pembangunan sering kali bahkan dijadikan sebagai alat atau ideologi tertentu untuk meredam daya kritis individu atau masyarakat. Disisi lain, pembangunan merupakan alat bagi kepentingan internasional untuk mencapai tujuan mereka. Tentu, ada banyak konsep pembangunan yang lain dijelaskan oleh para sarjana. Mereka memiliki perspektif sendiri didalam memberikan makna pembangunan. Makna dari konsep pembangunan ditentukan dari cara poandang ataupun perspektif yang hendak diIcapai. Perbedaan cara pandang dan perspektif yang hendak dicapai inilah yang mengakibatkan beragamnya makna pembangunan. Dengan kata lain, definisi akan memengaruhi tujuan.<sup>40</sup>

Pembangunan banyak dipahami sebagai kata benda netral yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pengertian seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosia. Namun demikian, pembangunan juga merupakan suatu *discourse*, suatu pendirian, atau suatu paham atau bahkan suatu ideology tertentu tentang perubahan social. Sama dnegang dibangun; jalan-jalan yang dibuatn konsep politiok, pembangunan juga merupakan suatu konsep yang masih diperdebatkan dan menuai banyak kritik. Misalnya, sekelompok pemikir yang tergabung *Daq Hammarsjkjold Foundation* (Swedia) mengajukan apa yang disebut “pembangunan yang lain” (*another development*).<sup>41</sup>

Pada konteks yang rill, pembangunan juga pada umumnya dipahami hanya sebagai kegiatan-kegiatan yang lebih berkonotasi fisik. Artinya melakukan

---

<sup>40</sup>Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*.(Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 91

<sup>41</sup>Warjio, h. 91

kegiatan-kegiatan bersifat fisik, bahkan seringkali secara sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Berdasarkan dari pengertian ini, seringkali keberhasilan suatu pembangunan diukur hanya seberapa banyak gedung-gedung yang dibangun; jalan-jalan yang dibuat; makin banyak gedung yang bertingkat atau banyak jalan tol atau meningkatnya pendapatan masyarakat, suatu Negara dianggap berhasil pembangunannya. Inilah yang disebut paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi.<sup>42</sup>

Beberapa penjelasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman pembangunan selama ini pada umumnya selalu saja dihubungkan dan dikaitkan hanya dengan persoalan ekonomi. Artinya, pembangunan itu sendiri adalah sebuah proses yang akan berujung pada perbaikan atau peningkatan ekonomi. Hal ini tidaklah mengherankan karena orientasi pemikiran pembangunan masih berkisar pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Maka, tidaklah mengherankan jika kemudian pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil dalam pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Hukum permintaan dan penawaran dalam kaitan antara produksi dan pasar dianggap sepenuhnya menentukan perekonomian. Periode pemikiran seperti ini berkembang antara tahun 1930-an hingga 1950-an. Inilah periode dimana liberalistik, kapitalistik mendominasi paradigma ekonomi. Ini tak lepas dari pemikiran ahli ekonomi, Keynes yang memberikan dasar rasional bagi pemikiran dan perencanaan ekonomi pada periode ini. Proses ini terus berkelanjutan.<sup>43</sup>

Transisi ideologi dari paradigma *Keynesian* menuju paradigma neoliberal selama tahun 1970 dan 1980-an mendirikan sebuah konteks politik eropa yang

---

<sup>42</sup>Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*. (Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 92

<sup>43</sup>Warjio, h. 95

baru. Kepedulian untuk meningkatkan daya saing global ekonomi nasional didirikan sebagai priority dalam arena politik. Dari prespektif ini, itu mendukung agenda penelitian akademik yang upaya berorientasi pada promosi dua ide kunci: “tidak berkelanjutan” dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan “*evidencebased*” budaya yang terkait dengan keajahteraan ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya publik.<sup>44</sup>

Mereka percaya pembangunan harus berorientasi kebutuhan, sanggup mempertemukan keperluan materi dan nonmateri manusia, berasal dari hati masyarakat, percaya kepada diri sendiri, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap masyarakat intinya mengandalkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri; mempunyai pertimbangan ekologis, pemanfaatan secara rasional sumber daya *biosphere* dan didasarkan pada transformasi struktural serta keseluruhan yang terpadu. Dalam satu hal, kelompok ini menolak gagasan jalan pembangunan yang universal dan menganjurkan bahwa setiap masyarakat memiliki strateginya sendiri. Berdasarkan pada kenyataan itu, berbagai perspektif mengenai pembangunan banyak dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”.<sup>45</sup>

Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat Negara, terutama melalui proses industrialisasi yang mengikuti pola yang seragam dari satu Negara ke Negara lainnya.<sup>46</sup> Dari pemikiran ini, orientasi ataupun paradigm pembangunan tidak hanya sebatas pada persoalan ataupun pencapaian ekonomi. Pembangunan yang akan dicapainya terkait erat dengan siapa atau kelompok mana yang berperan dalam mencapai tujuan itu. Dari pemikiran ini, pembangunan

---

<sup>44</sup>Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*.(Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 95

<sup>45</sup>Warjio, h. 95

<sup>46</sup>Calvert & Calvert.*Politik and Society ind The Third World (England: Longmenn Education, 2001) h. 49.*

yang hanya berorientasi pada ekonomi tidak mencukupi untuk menjelaskan tentang siapa dan mengapa serta bagaimana pembangunan itu dilakukan atau dibuat.<sup>47</sup>

Pembangunan sebagai persoalan politik yang terkait erat dengan kepentingan dan kekuasaan serta identitas dari individu, kelompok maupun Negara. Baik yang terkait dengan kepentingan individu, local ataupun internasional. Secara normatif, pembangun jelas memiliki makna yang positif: untuk membangun, untuk perbaikan. Namun pembangunan juga mengandung berbagai kepentingan tentang bagaimana orang, kelompok Negara atau internasional ingin mencapai tujuannya dalam pembangunan yang diinginkan sehingga kepentingan-kepentingannya dapat diakomodasi. Pernyataan pembangunan, kata-kata pembangunan dan pengertian pembangunan tergantung kepada kekuasaan hegemonik dominan yang berada dipenguasa tingkat local, regional maupun global.<sup>48</sup>

Di tingkat lokal misalnya, para aktor ataupun pemilik hegemoni kekuasaan berperan aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada implementasi pembangunan. Mereka bisa melakukan perananan ini baik dengan kekuatan sendiri yang dimilikinya ataupun menjalin kerjasama dengan individu ataupun kelompok atau kekuasaan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Di tingkat nasional, Negara sebagai sebuah kekuatan yang memiliki hegemoni kekuasaan besar dapat merancang dan mengendalikan pembangunan sebagaimana keinginannya difasilitasi oleh sistem yang ada didalam Negara. Atas alasan legalitas, hegemoni Negara atas pembangunan dibangun bisa dengan cara yang lembut atau dengan cara otoriter. Di tingkat regional atau global, kekuatan hegemoni untuk pembangun dilakukan melalui kerjasama dalam satu

---

<sup>47</sup>Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*.(Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 96.

<sup>48</sup>Warjio, h. 97

kepentingan yang sama. Peran kapitalisme dan pemilik modal menjadi kekuatan sentral yang dapat mengendalikan kerjasama atau kepentingan itu. Hegemoni kekuasaan atas pembanguna bagi tingkat local, nasional, regional ataupun global biasanya didasari oleh ideology yang mendorong mereka untuk melakukan atau merekayasa pembangunan.<sup>49</sup>

Atas alasan dan latar belakang ini penulis mengambil teori ini sebagai acuan bahwa pembangunan adalah sebuah rekayasa politik yang muncul dan dikembangkan oleh individu ataupun kelompok atas dasar perluasan imperialisme yang dilakukan oleh Negara-negara Barat dan dibentuk berdasarkan proses politik untuk mencapai tujuan.

Teori pembangunan dapat dijadikan pondasi untuk mengemukakan prinsip pembangunan infrastruktur dan bagaimana kemudian pembangunan politik itu bisa berarti negatif jika dibenturkan dengan kasus-kasus proyek pembangunan yang pernah ada di Indonesia. Maka dari itu teori ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana corak atau karakteristik pembangunan di daerah Kab.Bulukumba, terkhusus di Kec.Bonto Bahari yang menjadi tempat penelitian akan dilakukan terkait pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Pembangunan infrastruktur tentunya mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia, begitupun sebaliknya. Maka perlu adanya kesadaran individual yang kemudian suatu saat mampu menghadirkan kesadaran kolektif agar pembangunan bangsa dan Negara dapat terwujud tanpa adanya individu atau kelompok masyarakat yang dirugikan dalam kompetisi yang syarat akan keberpihakan dengan memanfaatkan kekuasaan. Konsep demokrasi yang dianggap sebagai suatu konsep bernegara yang baik, dengan kedaulatan ditangan rakyat akan tetapi melalui sistem perwakilan rakyat, sehingga dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan

---

<sup>49</sup>Warjio, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori Aktor dan Ideologi*.(Jakarta : Kencana Prenamedia Group). h. 97-98

public, alih-alih kepentingan masyarakat terealisasikan, justru kepentingan individu dan kelompok perwakilan rakyat yang diutamakan untuk direalisasikan.

Dalam bukunya *De Cive*, Hobbes mengawali tulisannya dengan menyerang konsep Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk alamiah untuk sebuah kehidupan politik atau sebuah politik kebinatanganan. Dengan kata lain, kehidupan di dalam negara tidak datang secara alamiah. Pandangan Aristoteles didasarkan pada ide *eudaimonia* atau *happiness* (kebahagiaan) dimana individu selalu melihat kebaikan tertinggi. Hobbes mempertahankan situasi pra sejarah bahwa dalam *state of nature*, manusia memiliki hak untuk melakukan hal terbaik bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan tertinggi.<sup>50</sup>

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebahagiaan (*vain, glory, dan greed*) yang diinginkan oleh individu tersebut sama dengan yang diinginkan oleh individu lainnya? Hobbes mengatakan bahwa setiap individu memiliki hasrat sebagai anti sosial dan bahkan individu yang satu memiliki kecenderungan untuk konflik dengan individu lainnya. Ada tiga prinsip penyebab pertengkaran dalam pandangan Hobbes. *Pertama, competition* (kompetisi), yaitu para individu menyerbu untuk mendapatkan sesuatu. Mereka menggunakan kekerasan untuk menguasai pribadi dan milik orang lain. *Kedua, mistrust* (ketidakpercayaan), yaitu para individu berselisih untuk menyelamatkan atau mempertahankan milik mereka atau istri-istri, anak-anak, dan ternak mereka. *Ketiga, glory* (kejayaan), yaitu individu-individu berselisih untuk hal-hal sepele, seperti sebuah kata, senyuman, perbedaan pandangan, dan lain-lain sebagainya. Mereka berselisih

---

<sup>50</sup> Thomas Hobbes, *De Cive.*, h. 18.

terhadap hal-hal sebagai tanda bahwa individu yang satu meng-*underestimate* individu lainnya.<sup>51</sup>

Dalam *De Cive*, Hobbes mengemukakan dasar asumsinya tentang *human nature* (manusia alamiah) sebagai makhluk individu *distrust and dread each other*<sup>52</sup> (rasa tidak percaya dan rasa takut antara satu individu dengan individu lainnya). Dalam kaitan ini, Hobbes mengemukakan beberapa pengalamannya sebagai berikut: *Pertama*, negara-negara berupaya mempertahankan diri dari serangan tetangganya. *Kedua*, para individu dilatih menjadi tentara, termasuk negara-negara hukum, dan mengunci pintu-pintu mereka dengan baik untuk menjaga para pencuri dalam masyarakat. *Ketiga*, seseorang tidak dapat membedakan antara yang jahat dan yang berbudi. Yang paling krusial menurut Hobbes adalah poin ketiga, sebab sebagai makhluk alamiah, manusia tidak memiliki pengetahuan tentang individu lainnya. Kita mengetahui beberapa individu yang jahat dan saling bermusuhan, tetapi kita tidak selamanya dapat mendeteksi individu mana yang jahat.<sup>53</sup>

Karya Hobbes yang mendiskusikan tentang civil society adalah *De Cive: Philosophical Rudiments Concerning Government and Civil Society*. Buku ini mendiskusikan tentang elemen-elemen kebijakan civil tentang persetujuan dalam hal hukum-hukum alamiah dan hukum-hukum keIlahian dengan mendemonstrasikan asal-usul keadilan. Meskipun Hobbes selalu memandang manusia dari sisi negatif, namun ia memiliki pandangan tersendiri tentang konsep

---

<sup>51</sup> Lihat J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, h. 5

<sup>52</sup> Lihat Thomas Hobbes, *De Cive*, h. 90

<sup>53</sup> Marshall Missner, Skopticism and Hobbes's Political Philosophy, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 44, No. 3 (July – Sep., 1983), h. 407-427



civil society. Pandangan Hobbes tentang civil society bukan saja bertentangan dengan Iqbal yang meletakkan prinsip dasarnya dari Alquran dan hadis, tetapi juga filsuf sezaman dan senegaranya John Locke memiliki pandangan yang sangat kontroversi. Locke sangat menentang sistem kenegaran monarki absolut sebab bertentangan dengan prinsip civil society.<sup>54</sup> Sementara itu, Hobbes sangat merekomendasikan sistem kenegaraan monarki absolut, sebab hanya melalui pemerintahan yang kuat negara akan aman yang pada gilirannya civil society juga ikut aman. Kesamaan pandangan Hobbes dan Locke adalah penolakan mereka terhadap sistem monarki absolut yang eksis di zaman mereka, dimana raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan.

Dari fenomena tersebut, Hobbes menarik dua kesimpulan: *Pertama*, menata masyarakat dalam prinsip-prinsip normatif, seperti tuntutan moral dan agama adalah mustahil. Prinsip-prinsip tersebut hanya dikemukakan sebagai kedok untuk menutupi nafsu-nafsu yang rendah. *Kedua*, masyarakat hanya dapat ditata dalam perdamaian, apabila pengaruh emosi dan nafsu dapat dielakkan.<sup>55</sup>

Apa yang telah dikemukakan Thomas hobbes bahwasannya manusia tidak dapat membedakan individu yang jahat dan individu yang berbudi, jika kita benturkan dengan realitas yang terjadi ditengah-tengah kehidupan kita, masyarakat Indonesia mengalami hal yang demikian, maka dari itu perlu adanya kesadaran kolektif akan politik yang ditopang dengan kartakteristik/pribadi yang baik pula. Pada persaingan pasar bebas rawan terjadi diskriminasi dan eksploitasi berbentuk regulasi yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem

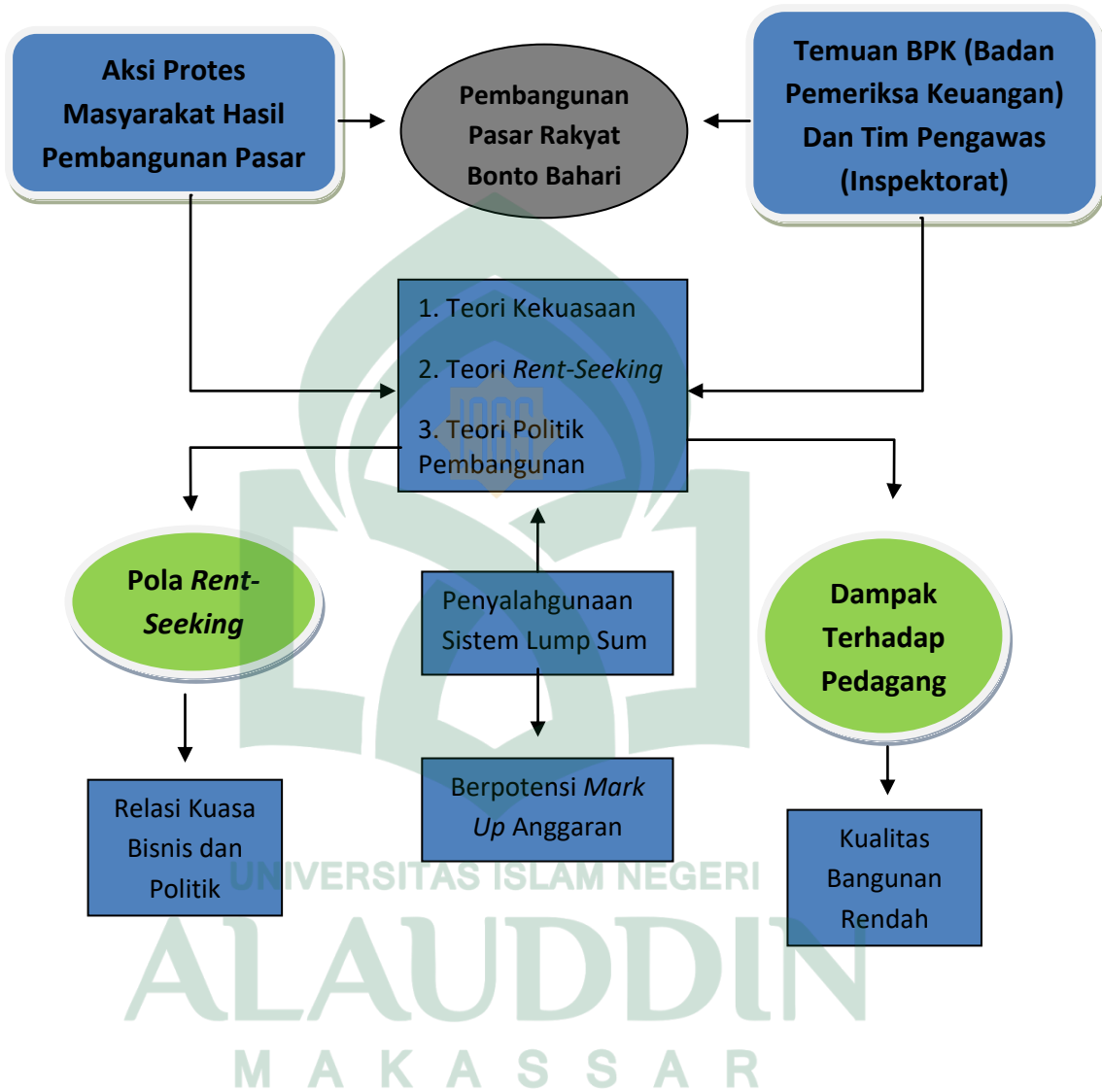
<sup>54</sup> Lihat Muhammad Saleh Tajuddin & Ismah Tita, h. 82

<sup>55</sup> Lihat Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Grameia; 1994).

politik. Bahkan menganggap politik itu adalah sesuatu yang kotor, ini tentunya bukan tanpa alasan, masyarakat melihat dan merasakan sendiri bagaimana kemudian wakil rakyat misalnya, ketika hendak mencalonkan diri bersikap manis dan dermawan namun pada saat menduduki tahta kekuasaan tidak mampu merepresentasikan rakyat yang menjadi konstituennya. Pendidikan politik menjadi salah satu instrumen untuk memberikan pemahaman politik bagi masyarakat agar masyarakat mampu mengaktualisasikan pandangan politiknya, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.



### B. Kerangka Konseptual



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bodgan, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>56</sup>

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.<sup>57</sup>

#### **B. *Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini terfokus pada praktek *rent-seeking* dan dampaknya terhadap pedagang pada pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari yang terletak di Kec. Bonto Bahari.

#### **C. *Sumber Data***

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi :

---

<sup>56</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*(Jakarta; Kencana 2011) h.166

<sup>57</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, h.172

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Disebut juga data asli atau data baru.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Untuk memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara maka peneliti mendatangi kantor dan mendatangi kediaman informan untuk memperoleh informasi melalui penuturan langsung dari informan. Adapun informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Andi Cawa Miri selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.
- b. Andi Idam selaku Kepala Bagian perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.
- c. Muhammad Aris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- d. Andi Baliraja selaku Aktivis Masyarakat.
- e. Kepala Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
- f. Pegawai Bagian Retribusi Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- g. Ajus selaku Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari
- h. Baco' selaku Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari
- i. MI selaku distributor logistic penyedia jasa konstruksi pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.

---

<sup>58</sup>Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal* (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), hal. 159.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang tersedia.<sup>59</sup>

Data Sekunder yang di peroleh peneliti berupa berita online, situs online buku, jurnal, skripsi, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba yang diakses secara online.

### ***D.Teknik Pengumpula Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Pengamatan (*Observasi*)**

Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan hubungan partisipatifnya dengan kelompok yang diamatinya.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, pengamat bertindak sebagai peneliti, yakni mengamati dan mencari informasi terkait penelitian yang dilakukan, sepanjang yang dibutuhkan. Adapun peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap bangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, mulai dari bangunan kios pasar sampai pada saluran drainase, karena kedua hal tersebut yang berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, terdapat keretakan pada bagian dinding kios-kios pasar dan saluran drainase yang memang benar tidak memiliki pembungan akhir, sehingga ketika saluran tersebut terisi penuh maka dapat menimbulkan genangan di area pasar,

---

<sup>59</sup>Syamsuddin, dkk., hal. 160.

<sup>60</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 116.

bahkan dapat menimbulkan banjir. Kemudian peneliti juga mendengarkan keterangan dari masyarakat yang melakukan penolakan terhadap hasil pembangunan, dan juga mendengarkan keluhan dari pedagang. Adapun beberapa informasi berupa dokumen kontrak kerja Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Keseluruhan pengamatan, baik itu kondisi dilapangan dan beberapa informasi berupa pernyataan dari masyarakat, terkhusus pedagang itu kemudian di elaborasikan untuk mendapatkan hasil pengamatan seobyektif mungkin.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *snowball* (wawancara tidak terstruktur). Wawancara metode *snowball* (wawancara tidak terstruktur) adalah metode wawancara yang bergulir dari satu informan ke informan yang lainnya, tanpa terikat pada pola-pola tertentu. Di mulai dari wawancara bersama Kepala DISPERINDAG Kab. Bulukumba, Kepala Bagian Perdagangan DISPERINDAG, Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba, salah satu pekerja proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, hingga kepada masyarakat yang melaporkan hasil pembangunan Pasar kepada Kejaksaan RI Kab. Bulukumba dan Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari.

---

<sup>61</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 119.

### 3. Metode Dokumenter

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Biro Pusat Statistik adalah dokumen yang mencatat perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Jurnal dalam bidang keilmuan tertentu termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Bahkan, literature-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini perlu dicatat sebagai sumber informasi.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini dokumentasi yang dapat dikumpulkan oleh peneliti berupa beberapa foto bagian pasar yang mengalami keretakan, foto dari berita online, dokumen kontrak kerja Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, surat laporan masyarakat mengenai hasil pembangunan pasar, dan beberapa jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### ***E. Teknik Penentuan Informan***

Dalam penentuan informan, penelitian ini menggunakan teknik sampel *snowball* (bola salju). Seperti namanya, teknik ini seperti layaknya bola salju, menggelinding dari bulatan kecil terus menerus sampai menjadi besar. Teknik sampel ini dimulai dari sampel kecil beberapa orang. Dalam perkembangannya jumlah orang yang diwawancarai akan terus berkembang sampai jumlah terpenuhi.<sup>63</sup> Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, yang di mulai dari wawancara bersama Andi Cawa Miri selaku Kepala DISPERINDAG Kab.

---

<sup>62</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 123.

<sup>63</sup> Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik* (Yogyakarta : LKiS, 2007), h. 256.



Bulukumba dan Kepala Bagian Perdagangan DISPERINDAG, Andi Idham untuk mengetahui latar belakang adanya proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba, hal ini sangat penting mengingat bahwa peranan Inspektorat cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap program kerja pemerintah. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Haris selaku pihak dari PPK (Panitia Pembuat Komitmen) dalam Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, setelah melakukan wawancara, peneliti mendapatkan informasi mengenai pihak pelapor yang melakukan aksi protes terhadap hasil Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, yaitu Andi Baliraja. Kemudian pembimbing Skripsi menyarankan agar peneliti melakukan wawancara terhadap pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data***

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang lazim disebut dengan *interactive model*. Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen yakni: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).<sup>64</sup>

##### **1.Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data

---

<sup>64</sup>Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hill, CA: Sage Publications, 1984).

untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>65</sup>

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.<sup>66</sup>

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah dan disempurnakan oleh peneliti sehingga dapat ditampilkan sebagai sebuah informasi atau hasil temuan dari lapangan.

## **3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*)**

Pada tahapan ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari *display data* yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada.

---

<sup>65</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 129-130.

<sup>66</sup>Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 105-106

Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.<sup>67</sup>

Peneliti berdasarkan data-data temuan di lapangan, melakukan penarikan dan pengujian kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara satu data dengan data yang lain kemudian dianalisis menggunakan teori sehingga menjadi informasi yang komprehensif.



---

<sup>67</sup>Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 106

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Kabupaten Bulukumba

##### a. Letak geografis

Secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba terletak diempat dimensi, yakni daerah tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Daerah.<sup>62</sup> Kita ketahui bahwa Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.<sup>68</sup>

##### b. Topografi

##### 1). Morfologi Bergelombang

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter diatas permukaan laut meliputi 7 kecamatan pesisir antara, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.<sup>69</sup>

##### 2). Morfologi Perbukitan

Daerah perbukitan dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba”<https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).

<sup>69</sup> Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba.

<sup>70</sup> Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba”<https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).

### c. Ketinggian

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi sampai hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28 % maka dataran tinggi mencapai 49,72 %. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s/d 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale.<sup>71</sup>

### d. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba memiliki suhu rata-rata berkisar antara 23,820 C – 27,68 0 C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Kabupaten Bulukumba berada disekitar Timur, musim gadu antara oktobermaret dan musim rendengan antara april-september. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang terbesar dibeberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bulu-Bulu, stasiun Bonto Bahari dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah meliputi curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.<sup>72</sup>

## 2. Kecamatan Bonto Bahari

### a. Letak Geografis

Kecamatan Bonto Bahari merupakan kecamatan yang paling ujung selatan dari Pulau Sulawesi dengan ibukota Tanah Beru, Kecamatan ini bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bonto Tiro dan Ujung Loe, bagian timur

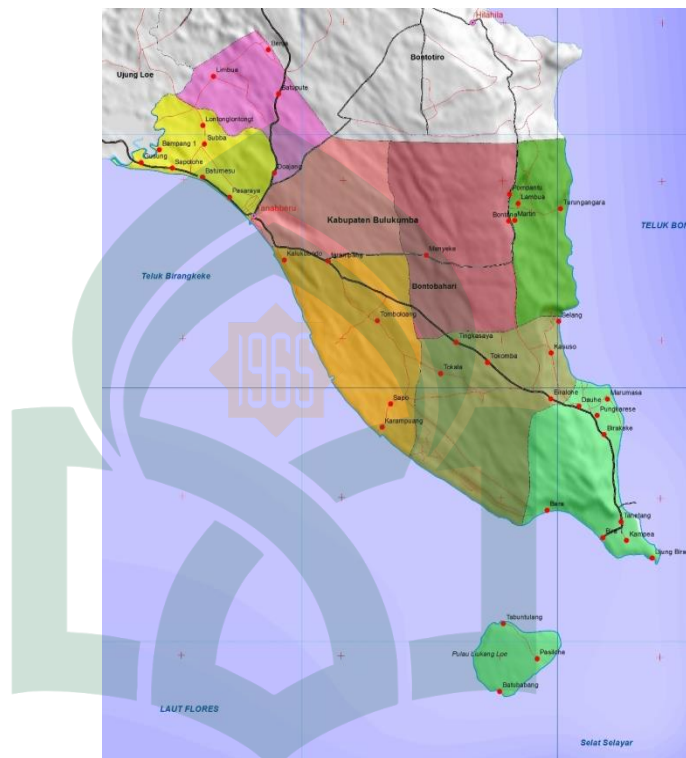
---

<sup>71</sup> Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “*Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba*.”

<sup>72</sup> Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “*Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba*.”

berbatasan dengan Teluk Bone, bagian selatan berbatasan dengan Selat Selayar dan kabupaten Selayar, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Laut Flores.<sup>73</sup>

**Gambar 4.1**  
**Gambar Peta Wilayah Kecamatan Bonto bahari**



Sumber : Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017

Luas wilayah Kecamatan Bonto Bahari tercatat 108,00 km persegi meliputi 8 Desa/Kelurahan. Pada akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kecamatan Bonto Bahari terdiri dari 8 Desa/Kelurahan, yaitu Desa Bira, Darubiah, Ara, Lembanna, Kelurahan Sapolohe, Tanahberu, Tanah Lemo, dan Kelurahan Benjala.<sup>74</sup> Berikut Tabel luas wilayah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bonto Bahari:

<sup>73</sup>Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, "Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).

<sup>74</sup>Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, "Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah, Status, dan Klasifikasi menurut Desa/Kelurahan di**  
**Kecamatan Bonto Bahari 2016**

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Status	Klasifikasi
Bira	19,5	Desa	Swasembada
Darubiah	16,9	Desa	Swasembada
Tanah Lemo	16	Kelurahan	Swasembada
Ara	13,4	Desa	Swasembada
Lembanna	11,7	Desa	Swasembada
Tanah Beru	7,1	Kelurahan	Swasembada
Sapolohe	7,2	Kelurahan	Swasembada
Benjala	17	Kelurahan	Swasembada
Bonto Bahari	108,00 km <sup>2</sup>		

Sumber : KASI PMD Kecamatan Bonto Bahari, BPS Kab.Bulukumba, di kutip dari Kecamatan Bonto Bahari Dalam Angka 2017.

#### **b. Kependudukan**

Masyarakat Kecamatan Bonto Bahari didominasi Suku Konjo, dan Etnis Bugis. Penduduk Kecamatan Bonto Bahari berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 24.848 jiwa yang terdiri atas 11.271 jiwa penduduk laki-laki dan 13.577 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bonto Bahari tahun 2017 mencapai 2.290 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang.

Kepadatan penduduk di 8 Desa/Kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kelurahan Sapolohe dengan kepadatan

sebesar 764 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kelurahan Tanah Beru sebesar 279 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>75</sup> Berikut tabel kependudukan Kecamatan Bonto Bahari:

**Tabel 4.2**  
**Banyaknya Penduduk, Luas Desa dan Kepadatan menurut Desa/Kelurahan**  
**di Kecamatan Bonto Bahari 2016**

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah ( km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/ km <sup>2</sup> )
Bira	19,5	3,458	177
Darubiah	16,9	2,812	167
Tanah Lemo	16	4,262	267
Ara	13,4	2,054	153
Lembanna	11,7	2,257	193
Tanah Beru	7,1	1,969	279
Sapolohe	7,2	5,460	764
Benjala	17	2,576	152
Bonto Bahari	108,00 km <sup>2</sup>	24.848	2.152

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

### 3. Sejarah Pasar Bonto Bahari

Pasar sebagai implementasi pemanfaatan ruang yang merupakan ruang untuk masyarakat (penjual - pembeli ) berinteraksi secara langsung dalam proses jual-beli. Sejarah pasar diawali pada zaman pra sejarah dimana dalam memenuhi kebutuhan manusia, mereka yang hidup di zaman dahulu melakukan barter. Barter adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh dua individu dengan cara menukar barang satu dengan barang yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena potensi wilayah antara dua individu tersebut memiliki perbedaan dalam menghasilkan

<sup>75</sup>Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba<https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).



berbagai kebutuhan yang bisa disebabkan oleh faktor geografis. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan manusia, manusia mulai mengenal mata uang sebagai alat tukar yang mendasari dalam proses jual beli barang. Perkembangan zaman khususnya di bidang perdagangan semakin maju, maka munculah sekelompok orang yang bergerak sebagai pedagang. Para pedagang inilah yang awalnya membuat perjanjian tentang dimana tempat aktifitas dagang dan kapan waktu perdagangan dilakukan.

Pasar Rakyat Bonto Bahari sebelumnya bernama Pasar Raya yang beraktifitas pada waktu-waktu tertentu seperti pagi hari, sore hari atau pada pekan-pekan tertentu dengan menjual kebutuhan sembako dan produksi. Terkait bentuk bangunan di pasar ini awalnya masih sangat tradisional seperti berbentuk bangsal, emperan, los, gudang, toko, stand/kios. Pasar Raya terletak di Kelurahan Sapolohe, tepat berada sekitar 20 m dari jalur provinsi. Di Pasar Raya Bonto Bahari ini kita dapat berinteraksi dengan para pedagang yang merupakan penduduk asli Kecamatan Bonto Bahari yang kemudian menjual berbagai macam kebutuhan pokok rumah tangga, seperti beras, ikan, sayur-sayuran dan banyak aneka jajanan yang bisa kita nikmati, meskipun luasnya tidak seperti dengan Pasar Rakyat Bonto Bahari yang sekarang, namun Pasar Raya sendiri menjadi pasar pertama yang menjadi pusat transaksi jual-beli bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari. Hal ini berdasarkan keterangan oleh salah seorang saksi hidup permindahan Pasar Raya Bonto Bahari, Baco' yang juga merupakan salah satu pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari, melalui wawancara yang dilakukan peneliti beliau mengatakan bahwa:

*“Saya di sini tahun 1983 di kompleks Pasar Bonto Bahari dan lokasi pasar dipindahkan dari tempat sebelumnya antara tahun 1981-1982 karena pada saat saya pindah ke sini sudah ada ini pasar. Dulu itu pasar belum terlalu padat masih ada beberapa kios saja itupun masih bangunan kayu kemudian dilakukan perbaikan pertama kali dengan*

*tambahan kios dengan bangunan batu atau beton dan yang kedua ini pembangunan kembali dilakukan tahun 2016 bangunan lama digantikan bangunan baru dengan model yang baru. kalau pagarnya dari dulu sampai sekarang memang tidak ada, karena memang tidak ada perubahan yang mencolok hanya mengganti dengan yang baru dengan model yang baru.”<sup>76</sup>*

Setelah dilakukan pemindahan Pasar, sekitar 100 m dari jalur provinsi dengan tetap berada di Kelurahan Sapolohe, Pasar Raya pun berganti nama menjadi Pasar Bonto Bahari dengan konstruksi bangunan yang lebih baik dari Pasar Raya, luas area pasar juga ditambah agar bisa menampung lebih banyak lagi pedagang, tidak hanya itu, Pasar Bonto Bahari kini beroperasi setiap hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu Pasar Bonto Bahari di anggap sudah tidak layak di tempati sebagai pusat interaksi jual beli di Kecamatan Bonto Bahari, karena beberapa bangunan yang sudah mulai rapuh konstruksinya ditambah lagi ketika hujan turun areal Pasar Bonto Bahari tergenang air dan mengakibatkan kondisi tanah menjadi becek dan terkesan mengganggu kenyamanan pengunjung maupun pedagang Pasar Bonto Bahari itu sendiri. Maka dari itu, pada tahun 2016 dilakukalah pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Berikut tampilan depan Pasar Rakyat Bonto Bahari pasca pembangunan kembali pada tahun 2016 lalu:

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

---

<sup>76</sup> Baco', Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari, Wawancara, Pasar Rakyat Bonto Bahari, Kec. Bonto Bahari, tanggal 16 Agustus 2018.

**Gambar 4.2**  
**Gambar Pasar Rakyat Bonto Bahari Dari Depan**



*Sumber: Rakyatku.Com, Bulukumba*

#### **B. Masalah Pada Pembangunan Pasar Bonto Bahari**

Salah satu titik fokus Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 ialah mengenai pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan dan terpenuhinya kepuasan masyarakat Bulukumba. Berjalan satu tahun pemerintahan Kabupaten Bulukumba keseriusannya dalam pembangunan dibuktikan dengan banyaknya perbaikan jalan, pembangunan masjid, pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan taman kota, hutan kota dan pembangunan pasar rakyat di beberapa kecamatan.

Salah satu yang menarik ialah Pembangunan pasar sebab pembangunan pasar menjadi program pembangunan prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pasar mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, sebagai salah satu pusat transaksi jual beli bagi masyarakat, tentunya pasar yang ideal akan menunjang kenyamanan dalam transaksi jual beli terlebih lagi dapat menunjang

kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi, dengan memanfaatkan APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat ada 5 pasar yang bersamaan dibangun pada tahun 2016 lalu, yaitu Pasar Rakyat Cekkeng, Ujungloe, Bontotanga, Tanete dan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Namun dalam perjalanannya pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana, mengingat dalam setiap pembangunan tentunya ada saja hambatan atau permasalahan, baik dalam perencanaan maupun dalam proses pembangunan, hingga pada saat difungsikan, salah satunya pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari yang kini menjadi sorotan masyarakat setempat, melihat sekitar 80% badan bangunan mengalami keretakan sebelum difungsikan, berdasarkan keterangan Andi Baliraja yang merupakan salah satu warga yang melakukan aksi protes, bahwa:

*“Kedalaman pondasi sangat rendah dan bahkan ada bangunan kios yang tidak di pondasi bahkan langsung diberi slop, timbunan yang digunakan adalah sisa tumpukan sampah yang ada di sekitar pasar, tidak ada timbunan baru. Begitupun tinggi permukaan pondasi jauh lebih rendah dari ruas jalan yang ada di sekitarnya, sehingga pada musim hujan air tergenang dan dapat mengakibatkan banjir karena tidak ada pembuangan air/ selokan. Bagian lantai pada los, basah akibat masuknya air hujan karena konstruksi bagian atas tidak tepat. Bangunan kios retak – retak yang dapat mengancam keselamatan bagi para penjual /pengguna pasar dan para konsumen”.*<sup>77</sup>


Hal inilah yang membuat masyarakat bingung karena pembangunan pasar tersebut sangat tidak sebanding antara volume pekerjaan dengan anggaran yang digunakan. Padahal Pasar Rakyat Bonto Bahari mempunyai nilai kontrak sebesar Rp. 5.654.063.000 yang disetujui oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi dengan PT. Citra

---

<sup>77</sup>Andi BaliRaja, Aktivis Masyarakat, Bulukumba, wawancara, Tanah Beru, Bulukumba, 6 Juni 2018.

Putera La Terang pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan Dokumen Kontrak Nomor : 118/Kontrak/KP3E-PPK/VIII/2016, dengan waktu pelaksanaan selama 120 Hari.

**Gambar 4.3**  
**Gambar Denah Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA</b> DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI ALAMAT : JL. BANDENG NO. 20 BULUKUMBA	
<b>Kegiatan</b>	: PEMBANGUNAN PASAR PERDESAAN
<b>Pekerjaan</b>	: Pengadaan Pembangunan. Pasar Perdesaan Pasar Bontobahari
<b>Lokasi</b>	: Kel. Sapolohe Kec. Bonto Bahari
<b>Biaya</b>	: Rp. 5.654.063.000,00
<b>Volume</b>	: 1 (Satu) PAKET
<b>Pelaksana</b>	: PT. CITRA PUTERA LA TERANG
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	: 120 Hari ( Seratus Dua Puluh Hari )

*Sumber: Dokumentasi Masyarakat Bonto Bahari*

Selain itu, dalam berita yang dimuat oleh Rakyatsatu.com, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali, bersama Ketua DPRD HA Hamzah Pangki pada tanggal 21 Januari 2017 telah meninjau lokasi pembangunan pasar Bonto Bahari.



**Gambar 4.4**  
**Gambar Kunjungan Bupati Ke Pasar Rakyat Bonto Bahari**



Sumber: *Rakyatsatu.com*

Pada kunjungan tersebut, Bupati menemukan saluran atau sistem drainase pada lokasi proyek belum tuntas, bukan hanya itu, bupati juga menemukan sarana listrik belum terpasang, padahal sarana listrik harus tersedia pada bangunan pasar Bonto Bahari. Pada beberapa titik, Bupati ternyata juga menemukan bangunan yang retak. Bupati Bulukumba memberikan teguran kepada kontraktor proyek pembangunan pasar agar segera menuntaskan seluruh persoalan yang masih ada, dan Kadis PERINDAG juga diminta agar mendesain kembali sistem drainase bersama Kadis Pemukiman dan Tata Ruang sehingga tidak merugikan warga.<sup>78</sup> Menurut peneliti dari kedua statement diatas, membuktikan bahwa secara kasat mata pembangunan pasar belum layak untuk ditempati dan sangat tidak sesuai dengan anggaran pembangunannya yaitu Rp. 5,6 Milyar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Idam selaku Kepala Bagian perdagangan DISPERINDAG, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>78</sup>Rakyat Satu, “Bupati dan Ketua DPRD Meninjau Pasar Bonto Bahari” <https://www.rakyatsatu.com/2017/02/bupati-dan-ketua-dprd-meninjau-pasar.html>. 7 Mei 2018.

*“Pasar Bonto Bahari itu menjadi perhatian, karena pasar Bonto Bahari merupakan salah satu pasar besar yang ada di Bulukumba, maka dari itu kita minta dana bantuan dari pusat melalui proposal, kebetulan kondisi pasar sudah tidak layak, dan kebetulan salah satu program Pak Jokowi itu pembangunan lima ribu pasar, jadi lima ribu bagi lima tahun pemerintahannya, artinya seribu pasar setiap tahunnya dibangun di Indonesia. Jadi, ini sebenarnya peluang bagi daerah yang memiliki pasar dan perlu perbaikan atau renovasi. Perbaikan infrastruktur dan struktur pasar menjadi penting bagi pendapatan daerah dan pasar memang perl diperbaiki, karena pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ada dipasar, jadi kalau itu saja tidak bisa dipenuhi artinya tidak bisa dikatakan berhasil suatu pemerintahan. Maka dari itulah Dinas Perdagangan mengajukan usulan ke Kementerian Perdagangan dan alhamdulillah kami dapat anggaran untuk pembangunan pasar Bonto Bahari. Kemudian dibuatlah perencanaan, setelah perencanaan selesai diserahkan ke Panitia Pembuat Komitmen untuk selanjutnya di serahkan ke BP untuk melakukan proses lelang secara online dan pesertanya bisa berasal dari daerah mana saja di Indonesia yang memenangkan tender, setelah itu kita tidak ikut campur didalamnya, kita hanya menerima hasil tender karena itukan ranahnya Unit Layanan Pengadaan, pmenang hasil tender bersamaan keluar dengan pengawasan, nah setelah itu dilanjutkanlah penandatanganan kontrak. Selanjutnya pengawaslah yang melakukan fungsinya dalam mengawasi proses pekerjaan bangunan, kami hanya sekali kali turun. Begitu selesai pasar, di serahkanlah ke Badan Pendapatan Daerah, untuk mengelola ini pasar, mulai persoalan retribusi pajaknya maupun kebersihan pasar tersebut, jadi kita ini hanya membangun.”<sup>79</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan hanya sebatas membangun pasar melalui proposal yang diusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan anggaran pembangunan pasar. Selanjutnya, mulai dari tenderisasi proyek pembangunan hingga selesainya pasar itu ada pihak tersendiri yang bertanggung jawab atas itu, misalnya pihak pengawas pekerjaan, dan saat pasar selesai dibangun, pasar tersebut dikelola Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dinas Perdagangan hanya menjalankan fungsi upaya pembangunan atau renovasi pasar yang dianggap sudah tidak layak di gunakan. Adapun jika dalam perjalananya atau setelah proses pembangunan pasar

---

<sup>79</sup>Andi Idham, Kepala Bagian perdagangan DISPERINDAG , Bulukumba, wawancara, Kantor DISPERINDDAG, Bulukumba, 11 April 2018.

dinyatakan selesai ada hal-hal yang tidak beres, itu diluar dari proses administrasi. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Andi Cawa Miri yang menyatakan:

*“pembangunan pasar Bonto Bahari secara administrasi itu tidak ada masalah, karena memang kita menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dibuktikan dengan keluarnya pernyataan hasil penyelidikan dari Ombusman yang menyatakan bahwa tidak terdapat mal administrasi dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, saya juga sudah diperiksa oleh kejaksaan. Jadi saya pikir ini hanyalah persoalan politik, mungkin saja hanya karena ada masyarakat tertentu yang tidak suka kepada Bapak Juharta ini, makanya ada yang melapor”*.<sup>80</sup>

Jika merujuk pada hasil penyelidikan yang telah dikeluarkan oleh Ombusman pada kasus pembangunan pasar Rakyat Bonto Bahari, tidak ada masalah pada persoalan administrasi, karena semuanya sudah sesuai dengan sistem yang berlaku dan dibuktikan dengan adanya hasil penyelidikan dari Ombusman yang menyatakan tidak terdapat maladministrasi dalam pembangunan Pasar Bonto Bahari. Dan memang temuan dari masyarakat itu berupa kondisi fisik bangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, sehingga hal inilah yang menjadi titik permasalahan yang membuat masyarakat beranggapan bahwa ada yang tidak beres dalam pembangunan pasar dengan anggaran yang cukup besar tersebut.

Melihat kondisi bangunan pasar yang tidak sesuai dengan harapan dan prinsip pembangunan pada umumnya, masyarakat Bonto Bahari yang dipimpin oleh Bapak Baliraja pada tanggal 13 Maret 2017 mengajukan laporan ke Kejari Kabupaten Bulukumba untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap temuan yang diperoleh Andi Baliraja. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Andi Baliraja selaku pelapor, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>Andi Cawa Miri, Kepala DISPERINDAG Kab. Bulukumba, wawancara, Kantor DISPERINDAG, Bulukumba, 11 April 2018.



*"Saya senang ada mahasiswa yang juga memperhatikan kasus dan mau meneliti ini. Sebab dalam pembangunan ini sangat banyak yang menurutku hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, bayangkan anggarannya 5,6 milyar tapi begitujuga pasarnya. Sudah perhatikan pasarnya? Bangunannya retak, manami tidak ada pembuangan airnya, bahkan ada yang tidak dipondasi. Lebih parah pondasinya lebih rendah daripada ruas jalan padahalkan ada itu Undang-Undangnyamengenai pondasi bangunan harus 50 cm, tapi saya lupa itu pasal berapa, tapi memang ada itu pasal. Intinya, secara kasat mata saja, bisajiditau kalau memang ini bermasalahki."*<sup>81</sup>

Dasar pemikiran masyarakat setelah melihat kondisi bangunan pasar mengindikasikan adanya tindakan melanggar aturan mengenai konstruksi bangunan dan dengan anggaran yang nilainya begitu besar menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan pasar pedesaan di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Selain itu masyarakat menduga adanya oknum yang melakukan *mark up* atau penggelembungan anggaran sehingga ada kemungkinan hal ini menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan. Tetapi pihak pemerintah dalam hal ini Muhammad Aris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyangkal pernyataan tersebut:

*"Sebenarnya tidak benar bahwa pemerintah menyalahgunakan dana tersebut, sebab saya selaku PPK hanya melakukan tugas yaitu memberikan dana,selebihnya semuanya dikerjakan oleh kontraktor. Tapi masyarakat tidak tahu, bahwa dalam proyek itu ada namanya Penyesuaian harga (Untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan harga satuan, contohnya: dalam proyek itu kita anggarkan pintu, kan kalo mau bangun pintu ada rangkanya, ada daun pintunya ada juga kuncianya tapi biasa kita anggap kuncianya tidak penting jadi kita alihkan untuk menganggarkan yang lain. Jadi begitu dek, jadi intinya kita mi pahami dek dimana mau pemerintah ambil keuntungan kalo semua dikerjakan oleh kontraktor."*<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti berpendapat bahwasannya memang posisi pemerintah dalam pelaksanaan proyek ini terlihat hanya sebatas

<sup>81</sup>Andi BaliRaja, Aktivis Masyarakat , wawancara, Tanah Beru, Bulukumba, 6 Juni2018.

<sup>82</sup>Muhammad Aris, PPK Pembangunan Pasar Bonto Bahari, wawancara Kantor DISPERINDDAG, Bulukumba, 11 April 2018.

pihak yang berperan pada tataran administrasi dan pengawasan, selebihnya dalam proyek tersebut anggaran dan pengerjaan pasar dikelola sepenuhnya oleh kontraktor, jika kita melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana. Namun perlu diketahui bahwa dari awal pihak pemerintah memegang peranan penting dalam penentuan pemenang tender proyek pembangunan, sebab dalam pemilihan pemenang proyek Pasar Rakyat Bonto Bahari, diutus kelompok kerja sebanyak 5 orang yang diutus dari instansi pemerintah untuk melakukan seleksi dan serangkaian proses evaluasi terhadap kontraktor yang melakukan penawaran, adapun daftar perusahaan:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Perusahaan**

No.	Hasil Pembukaan Dokumen		
	Nama Penawar/ Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)	Penawaran Terkoreksi (Rp.)
1.	PT Cipta Bening Dewata	5.174.025.000	5.174.025.000
2.	PT Gunung Raya Bulukumba	5.249.038.000	5.249.038.000
3.	PT Alena Mega Konstruksi	5.414.818.000	5.414.818.000
4.	PT Merefic Gemilang Putra	5.505.748.000	5.505.748.000
5.	PT Apro Megatama	5.540.000.000	5.540.000.000
6.	PT Palangkaraya Sakti Baruga	5.637.450.000	5.637.450.000
7.	PT Citra Putra La Terang	5.654.450.000	5.654.063.000

*Sumber: Dokumen Kontrak Nomor: 118/Kontrak/KP3E-PPK/VIII/2016.*

Setelah dievaluasi, maka ditetapkanlah PT Citra Putra La Terang sebagai pemenang dalam berita acara hasil evaluasi dengan Nomor: 023/BAHE/P.2/ULP-BLK/VIII/2016 pada tanggal 3 Agustus 2016. Sebelumnya, PT Citra Putra La

Terang telah memiliki banyak pengalaman dibidang pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan Mall Ratu Indah Makassar Nomor Kontrak: 07/Legal-KIK/SPP/VI/2013 pada tanggal 20 Juni 2013 dengan Nilai Rp.10.152.454.000,. Mall Ratu Indah kini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota makassar maupun luar kota makassar, karena disamping tempatnya strategis dan memiliki konstruksi bangunan yang menarik, Mall Ratu Indah menjadi salah satu tempat yang nyaman untuk berbelanja atau sekedar *refreshing*. Tetapi jika dibandingkan pembangunan pasar Rakyat Bonto Bahari dan Mall Ratu Indah, meskipun anggaran pembangunan pasar hanya setengah dari anggaran pembangunan Mall, dan meskipun pembangunannya sama-sama dilakukan oleh PT Citra Putra La Terang tetapi hasil yang didapatkan malah sangat jauh berbeda. Setidaknya, konstruksi bangunan pasar juga dapat seperti setengah dari bangunan Mall Ratu Indah. Hal inilah yang membuat peneliti semakin mencari tahu tentang penyebab tidak maksimalnya pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Dari hasil wawancara dengan Andi Baliraja, beliau mengatakan:

*“Sangat tidak masuk akal jika dana pembangunana pasar sebesar 5,6 Milyar itu hanya menghasilkan bangunan pasar yang seperti itu, saya kira semua orang juga jika melihat langsung Pasar Rakyat Bonto Bahari dengan anggaran pembangunan tersebut akan beranggapan sama dengan saya, saya yakin ada permainan dibalik ini semua. Saya juga sudah melapor ke Inspektorat Kabupaten Bulukumba dan Badan Pemeriksa Kabupaten Perwakilan SulSel agar melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ini”*.<sup>83</sup>

Inspektorat yang dalam hal ini adalah bagian dari perangkat pemerintahan yang memegang tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada setiap proyek pembangunan daerah teritorialnya, tentunya pemerintah dengan lembaga pembantu memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan dan

---

<sup>83</sup>Andi BaliRaja, Aktivis Masyarakat, wawancara, Tanah Beru, Bulukumba, 6 Juni 2018.

pencegahan atas tindakan-tindakan yang melanggar peraturan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Negara. Sehingga dapat dikatakan, kasus yang diduga terdapat tindak pidana korupsi yang sedang tersebut, bisa saja melibatkan beberapa pihak. Karena dalam beberapa kasus praktek rent seeking, tindakan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi biasanya terjadi karena ada relasi kuasa yang diikuti dengan praktek melobi agar bisa mendapatkan sumber daya yang menjadi kepentingan dalam sebuah bisnis. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Inspektorat Kabupaten Bulukumba, beliau menyatakan:

*“Kami dari lembaga Inspektorat adalah perangkat daerah yang membantu pekerjaan pemerintah, kami bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam setiap proyek pembangunan yang berada di daerah Kabupaten Bulukumba, jadi kami punya tim yang khusus turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengerjaan proyek, baik itu pembangunan jalan, gedung perkantoran, sekolah hingga proyek pembangunan pasar. Dalam setiap proyek, jika terjadi suatu keterlambatan pengerjaan atautkah ada ketidak sesuaian anatara RAB dan bangunan yang sedang dikerjakan, maka kita akan melakukan pembinaan, akan tetapi jika itu sudah menyangkut sesuatu yang lebih serius, misalnya terindikasi adanya tindakan merugikan Negara karena penyalahgunaan anggaran misalnya itu akan di tindak lanjuti ke ranah hukum”<sup>84</sup>*

Jadi dapat dikatakan bahwa Inspektorat yang merupakan perangkat daerah memegang peranan penting dalam setiap proyek pembangunan, karena memegang fungsi pengawasan dan pembinaan dalam setiap pembangunan infrastruktur daerah. Inspektorat juga bisa menjadi salah satu tempat menyampaikan aspirasi bagi setiap masyarakat Bulukumba yang mendapatkan temuan dalam proyek pembangunan yang dianggap menyalahi aturan dan hal-hal yang diluar daripada prinsip pembangunan itu sendiri.

---

<sup>84</sup>Andi Idham, Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba, wawancara, Kantor Inspektorat, Bulukumba, 10 April 2018.

### ***C. Pola Rent Seeking Dalam Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari***

Sejarah *Rent-Seeking* di Indonesia sangatlah panjang. Sejarah ini dibagi dalam dua era yaitu masa Kerajaan dan masa Penjajahan atau masa Kolonial Belanda. Pemerintahan yang berjalan pada masa Kerajaan memberikan peluang yang sangat besar untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok kepentingan, seperti pemberian berupa upeti<sup>85</sup>. Meskipun para penjajah menduduki Nusantara hingga masa Kerajaan runtuh, budaya memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu masih tumbuh subur. Bahkan sistem pemerintahan pun mendukung keadaan tersebut.

Ketika masa kolonial Belanda, upeti masih dilakukan dengan tujuan memperkaya diri, terdapat penumpukan harta, serta pemeliharaan sanak (abdi dalem), sementara rakyat miskin mudah untuk dihasut dan diadu domba. Selain itu, Belanda mengangkat beberapa rakyat untuk dijadikan pejabat yang tidak lain hanya menjadi boneka suruhan kolonial Belanda. Beberapa tugasnya seperti mengambil upeti dan pemungutan pajak lalu diserahkan untuk kepentingan pribadi kolonial. Budaya tersebut menjamur kepada tokoh-tokoh lokal hingga mengakar ke dalam sistem sosial-politik pada masa itu.<sup>86</sup>

Penyelewengan sistem Tanam Paksa merupakan contoh dari penindasan kaum pribumi yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Penduduk dipaksa untuk menanam 1/5 lahannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Tanam Paksa ini dalam aturannya tidak dipungut pajak, tetapi pejabat-pejabat pribumi justru melakukan penyelewengan dengan memungut pajak demi kepentingan pribadi. Selain itu, bagi penduduk yang tidak memiliki lahan, mereka diwajibkan untuk bekerja secara paksa selama umur padi atau sekitar 3.5

---

<sup>85</sup>Sejarah Pemberantasan Korupsi pada Masa Pemerintahan Kerajaan (Prakemerdekaan) yang termuat dalam <http://acch.kpk.go.id/jejak-pemberantasan-korupsi>, 12 April 2018

<sup>86</sup>Sejarah Pemberantasan Korupsi pada Masa Kolonial (Prakemerdekaan).

bulan. Akan tetapi, pelaksanaannya justru melebihi itu, yaitu bisa sampai satu tahun hingga seumur hidup. Jika terjadi gagal panen akibat bencana alam, seharusnya pemerintah yang menanggung kerugian, tetapi kenyataannya adalah kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh pemilik lahan. Sebaliknya, jika terjadi *over product* dan melebihi kuota, justru dinikmati oleh orang-orang pribumi yang menjadi suruhan Belanda (Belanda Item), padahal dalam aturannya, kelebihan itu dikembalikan kepada penduduk. Sistem Tanam Paksa yang seharusnya diawasi langsung oleh Belanda justru diambil alih oleh “Belanda Item” yang pelaksanaannya dapat lebih keji dari Belanda itu sendiri<sup>87</sup>.

Praktik memperkaya diri atau kelompok tertentu yang semakin menyebar khususnya di kalangan pribumi menyebabkan adanya pembentukan peraturan untuk memberantasnya. Sejarah mencatat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia sudah tertuang dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) 1 Januari 1918<sup>88</sup>.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada instansi yang berperan dalam pemberantasan *rent-seeking*, baik KPK, Kepolisian, BPK, maupun instansi lainnya. Hal ini disebabkan tidak semua perilaku *rent-seeking* merupakan perilaku yang melanggar hukum. Namun ketika perilaku *rent-seeking* termasuk dalam pelanggaran hukum, maka dapat ditindak oleh instansi terkait. Selain itu, Pengadilan tidak mengenal konsep *rent-seeking*, yang dilihat adalah perbuatannya. Pelaku *rent-seeking* (*rent seeker*) bukan termasuk produk penyidikan kepolisian. Jika perbuatan yang dilakukan *rent seeker* melawan hukum, maka dapat dilakukan penyidikan.

---

<sup>87</sup>Sejarah Pemberantasan Korupsi pada Masa Kolonial (Prakemerdekaan) yang termuat dalam [acch.kpk.go.id/jejak-pemberantasan-korupsi](http://acch.kpk.go.id/jejak-pemberantasan-korupsi) .

<sup>88</sup>Sejarah Pemberantasan Korupsi pada Masa Kolonial (Prakemerdekaan)

Pada proyek pembangunan kadang terdapat kasus-kasus korupsi pada mekanisme *rent-seeking* yang mirip sehingga membentuk pola-pola yang terjadi di setiap tahunnya atau dalam selang lebih dari satu tahun. Kemiripan dari kasus itu tidak hanya pada pra pelaksanaan proyek pembangunan, namun hingga pasca pelaksanaannya pun terdapat kemiripan. Secara keseluruhan, korupsi pada mekanisme *rent-seeking* tersebut dilakukan pada setiap lini.

Gordon Tullock adalah ekonom pertama yang membahas teori perburuan rente ekonomi ini. Fenomena perburuan rente dipelajari pertama kali dalam hubungannya dengan hak monopoli yang diberikan oleh Negara kepada pengusaha. Menurutnya, perburuan rente terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi terhadap lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi terhadap lingkungan usaha tersebut juga terjadi karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melakukan lobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*).<sup>89</sup>

Menurut Anne Krueger, pemburuan rente dalam kajian ekonomi politik berarti perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar, sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Perilaku perburuan rente dibedakan dari perilaku mencari untung dalam usaha atau bisnis yang sehat. Di dalam bisnis yang sehat, perusahaan menciptakan iklim nilai dan kemudian melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Tetapi, di dalam praktik perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan

---

<sup>89</sup>Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia



atau mempengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi.<sup>90</sup>

Tipe tipe pemburuan rente menurut michael ross dibagi menjadi dua tipe. Pertama, “*Rent creation*”, dimana perusahaan yang mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat. Kedua, “*Rent Extraction*”, dimana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan. Lalu ada satu tipe lagi yaitu rente ini diperebutkan oleh para birokrat, yaitu “*Rent Seizing*”, yaitu terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan oleh institusi-institusi negara untuk kepentingan individu atau kelompoknya.<sup>91</sup>

Pembangunan infrastuktur pada umumnya diawali dengan perencanaan, pengerjaan, pengawasan, dan pencairan dana. Perencanaan tersebut dibuat oleh penyelenggara, dalam hal ini pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota, yang biasanya didelegasikan kepada konsultan perencana. Perencanaan ini terkait dengan aspek teknis hingga sosial ekonomi, sehingga diperlukan berbagai penelitian. Setelah perencanaan disetujui oleh penyelenggara, maka proyek tersebut akan diumumkan untuk dikerjakan. Sistem pengerjaan berupa penunjukan langsung, atau pelelangan umum. Kemudian setiap pengerjaan diawasi oleh pengawas baik ditunjuk langsung maupun melalui proses tender. Setelah proyek selesai 100% sesuai ketentuan di dalam kontrak yang diawasi oleh pengawas, maka pelaksana dan penyelenggara akan melakukan serah terima atau

---

<sup>90</sup>Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia

<sup>91</sup><http://www.scribd.com/doc/118391055/PEMBURU-RENT-RENT-SEEKING-EPP-KEL-6#scribd>



disebut *Provisional Hand Over* (PHO), lalu dana pun akan cair 100% tidak termasuk pajak.<sup>92</sup>

#### **a). Pelelangan Umum**

Meskipun sistem penunjukan langsung pada proyek pembangunan cenderung rawan praktik monopoli yang berujung pada *rent seeking* dan korupsi, kasus yang lebih banyak ditemukan adanya *rent seeking* dan korupsi adalah pada sistem pelelangan umum yang dinilai merupakan sistem yang terbuka bagi umum. Hal ini disebabkan proyek pembangunan sebagian besar dilakukan melalui sistem pelelangan umum, termasuk pembangunan pasar. Selain itu, *rent-seeking* dan korupsi yang terjadi pada sistem pelelangan umum dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta (luar pemerintah), sehingga mudah untuk diawasi dibandingkan sistem penunjukan langsung yang cenderung menutupi kasus yang ada.<sup>93</sup>

Perencanaan pada pelelangan umum juga dapat berpotensi pada *rent seeking* dan berujung korupsi. Modus perencanaannya mirip dengan modus perencanaan pada sistem-sistem penunjukan langsung yaitu pejabat sebagai penyelenggara dapat lebih mengetahui tentang adanya rencana pembangunan. Kemudian pejabat tersebut meminta penunjukkan dirinya atau anggota kelompoknya untuk menjadi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Jasa Konstruksi dan Bangunan. Pada sistem pelelangan umum, Kelompok Kerja membuat perencanaan melalui konsultan perencana. Kemudian setelah perencanaan tersebut disahkan, POKJA Jasa Konstruksi dan Bangunan mengumumkan adanya

---

<sup>92</sup> Ikhsanuddin Al Hakim, Skripsi, *Rent-Seeking dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2014-2013)*, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor., 2015. h.45.

<sup>93</sup> Ikhsanuddin Al Hakim, Skripsi, *Rent-Seeking dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2014-2013)*. h.48

pembukaan pendaftaran peserta pelelangan umum. Sementara itu, terdapat potensi *rent-seeking* pada tahap ini yang berujung pada korupsi, yaitu pelobian.<sup>94</sup>

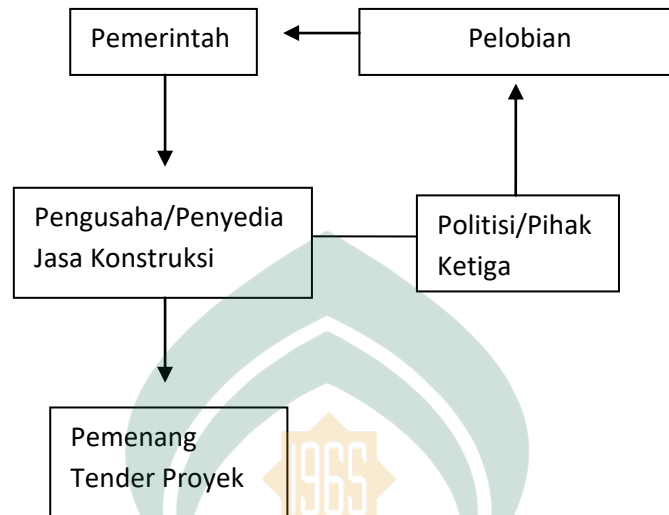
Pelobian tersebut dibedakan dalam dua cara. Cara pelobian yang *pertama* adalah pemerintah ke perusahaan/ swasta. PA/ KPA atau setidaknya pejabat yang berpengaruh dalam proyek pembangunan tersebut mengajak perusahaan atau setidaknya karyawan yang berpengaruh pada perusahaan untuk bekerja sama dalam penyediaan proyek pembangunan jalan. PA/ KPA menjanjikan kemenangan bagi perusahaan tersebut, namun perusahaan tersebut diminta untuk memberikan “balas jasa” kepada PA/ KPA atas kemenangannya. Sedangkan cara pelobian yang *kedua* adalah perusahaan/ swasta ke pemerintah. Perusahaan atau setidaknya karyawan yang berpengaruh pada perusahaan mengetahui rencana atau informasi pembukaan pendaftaran peserta pelelangan umum. Perusahaan tersebut terutama perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan PA/ KPA atau setidaknya pejabat yang berpengaruh dalam proyek pembangunan melobi kepada pejabat tersebut untuk menjadikannya pemenang dalam pelelangan umum. Perusahaan tersebut menawarkan “balas jasa” yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan sendiri, namun juga menguntungkan bagi pribadi PA/ KPA.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ikhsanuddin Al Hakim, Skripsi, *Rent-Seeking dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2014-2013)*, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor., 2015. h.48.

<sup>95</sup> Ikhsanuddin Al Hakim, Skripsi, *Rent-Seeking dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2014-2013)*, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor., 2015. h.48.

#### Bagan 4.1.1. Pola *Rent-Seeking* Pada Pelelangan Umum



Pelobian pada tahap pendaftaran hingga penyeleksian peserta pelelangan umum tersebut menyebabkan pemenang pelelangan umum tidak sesuai kriteria yang seharusnya atau dalam arti lain, pemenang pelelangan umum adalah perusahaan yang sudah melakukan pelobian terhadap PA/ KPA atau pejabat berpengaruh lainnya. Hal tersebut menyebabkan ketidakefisienan ekonomi karena pemenang pelelangan umum yang bermodalkan pelobian tersebut belum tentu memiliki kualitas yang lebih baik daripada peserta lain yang ikut dalam pelelangan umum tersebut.<sup>96</sup>

Misalnya, pada proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari dengan perencanaan anggaran senilai Rp. 5.772.760.000, pemenangnya adalah Perusahaan PT Citra Putra La Terang yang merupakan perusahaan lokal yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini yaitu seorang politisi lokal untuk melakukan pelobian agar dapat memenangkan lelang proyek pembangunan tersebut. Pernyataan ini dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh salah

<sup>96</sup> Ikhsanuddin Al Hakim, Skripsi, *Rent-Seeking dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2014-2013)*. h.49.

satu pekerja pada proyek pembangan Pasar Rakyat Bonto Bahari yang berinisial MI, yakni sebagai berikut:

*“Dalam pembangunan Pasar Bonto Bahari, saya bertugas sebagai distributor logistik. Kontraktor yang memimpin pengerjaan bangunan Pasar Bonto Bahari dengan nama perusahaan PT. Citra La Terang itu adalah teman dari adik ipar seorang politisi lokal, nah dari sinilah pihak kontraktor mendapat informasi tentang rencana pembangunan pasar, sebagai seseorang yang mempunyai relasi dalam pemerintahan politisi tersebut bekerja sama dengan pihak kontraktor agar dapat memenangkan lelang proyek”.<sup>97</sup>*

Keterangan diatas mendeskripsikan awal mula pertemuan pengusaha/pebisnis dengan politisi lokal yang telah memiliki relasi dalam pemerintahan yang kemudian bekerja sama untuk memenangkan tender proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Tentunya hal ini menguntungkan salah satu peserta tender, apalagi jika kita sudah berbicara persoalan akses atas informasi. Hal ini yang membedakan PT. Citra La Terang dengan peserta lelang proyek yang lainnya, meskipun peserta yang lain juga mendapatkan informasi mengenai lelang tender tersebut, akan tetapi tidak dengan relasi dengan politisi lokal yang telah memilki relasi kuasa dalam pemerintahan, sehingga hal yang demikian dapat mempengaruhi pelelangan tender proyek karena pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak-pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.<sup>98</sup>

Hal tersebut dipertegas dan diperjelas oleh Andi Cawa Miri, beliau mengatakan:

---

<sup>97</sup> MI, Pengawas Pekerja Konstruksi Bangunan, *Wawancara*, Makassar, 16 Agustus, 2018.

<sup>98</sup>Efriza, *Kekuasaan Politik*, ( Malang; Intrans Publishing, 2016), h. 41

*“Dalam pembangunan pasar Rakyat Bonto Bahari sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja ada kebencian sekelompok orang terhadap saudara juharta yang kawin dengan orang sana, dia yang mengerjakan itu, meskipun secara materil demikian, bukan dia punya CV, hanya karena kebencian maka beliau di proses, itu kalau saya ”<sup>99</sup>*

Keterangan diatas mengafirmasi adanya keterlibatan politisi lokal dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, meskipun tidak terlibat langsung sebagai pekerja atau bagian dari perusahaan berdasarkan structural PT. Citra Putera La Terang, namun keterlibatan tersebut tentunya memiliki muatan kepentingan jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, dimana relasi kuasa dan bisnis dapat mempengaruhi kebijakan dalam sebuah pembangunan. Dan telah di jelaskan pada uraian sebelumnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa politisi lokal yang memberikan informasi terkait lelang tender proyek yang kemudian bekerja sama untuk memenangkan tender proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.

PT. Citra Putera La Terang sendiri memiliki penawaran nilai kontrak sebesar Rp. 5.654.063.000, sementara penawaran perusahaan yang lain justru memiliki penawaran yang lebih rendah dibandingkan dengan PT Citra Putra La Terang. Dalam penilaian di luar nominalnya, PT Bening Dewata dan PT Alena Mega Konstruksi memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan PT. Putra Citra La Terang. Padahal jika yang menjadi pemenang adalah Perusahaan PT Bening Dewata, negara akan memperoleh penghematan senilai Rp480 juta (Rencana anggaran – penawaran nilai kontrak Perusahaan PT Bening Dewata), bahkan tanpa ada kebocoran berupa pelobian. Sementara ketika Perusahaan PT.

---

<sup>99</sup> Andi Cawa Miri, Kepala DISPERINDAG Kab. Bulukumba, wawancara, Kantor DISPERINDAG, Bulukumba, 11 April 2018.

Alena Mega Konstruksi menjadi pemenang, negara akan memperoleh penghematan senilai Rp239 juta (Rencana anggaran – penawaran nilai kontrak Perusahaan PT. Alena Mega Konstruksi), dana sebesar Rp 480 juta atau Rp 239 juta bisa dipergunakan untuk keperluan pembangunan yang lain.<sup>100</sup>

*Rent-seeking* yang bermula dari pelobian dapat dilihat dari sistem tenderisasi online yang berlaku bagi perusahaan yang ada di Indonesia, bisa saja di luar Sulawesi, akan tetapi, dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, yang menjadi pemenang tender merupakan perusahaan lokal, yang dikerjakan oleh seseorang yang sudah memiliki koneksi dalam pemerintahan. Perusahaan lokal tersebut dalam tahap kualifikasi dokumen perusahaan pada Evaluasi Penawaran Rendah Responsip dinyatakan memenuhi syarat dan dengan pertimbangan yang rasional menurut PA. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PKK senilai Rp.5,772,760,000 dan penawaran PT. Putra Citra La Terang adalah sebesar Rp5,654,450,000, sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran yang diajukan lebih mendekati HPS yang dibuat oleh Panitia Pembuat Komitmen (PKK) di bandingkan 6 perusahaan lain yang menjadi peserta pelelangan proyek, sehingga keluarlah PT. Putra Citra La Terang sebagai pemenang dalam pelelangan proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.<sup>101</sup> Anggaran pembangunan yang begitu besar nyatanya tidak dapat menjamin kualitas bangunan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan jika mungkin yang memenangkan tender adalah peserta

---

<sup>100</sup> Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan Dan Energi, *Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran*, Dokumen Kontrak Nomor:118/Kontrak/KP3E PPK/VIII/2016.

<sup>101</sup> Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan Dan Energi, *Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran*, Dokumen Kontrak Nomor:118/Kontrak/KP3E PPK/VIII/2016.

yang dengan penawaran lebih rendah, tentunya Negara dapat menghemat beberapa ratus juta, dan mungkin saja dengan kualitas yang lebih baik dari pada yang dikerjakan oleh PT. Putra Citra La Terang. Dengan anggaran yang demikian besarnya dapat berpotensi terjadinya pola-pola *rent seeking* yang berujung pada tindak pidana korupsi berupa praktek *mark up* pada anggaran pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.

*Rent-seeking* sebagai suatu tindakan yang bermuara pada tindak pidana korupsi masih sering kita temui di era reformasi ini. Jika pada masa Orde Baru masyarakat harus merasakan bagaimana praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam suatu pemerintahan yang otoriter, justru di era reformasi dengan sistem pemerintahan demokratis, nyatanya KKN masih terus membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan cara yang beragam. Tindak pidana korupsi yang kerap kali dilakukan oleh pejabat Negara mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga sampai ke pelosok desa, pun semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kehidupan adil dan makmur.

Dalam tulisannya *corruption and Rent-Seeking*, A.K. Jain mengemukakan bahwa perilaku *rent seeking* dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pada saat kesempatan lobi tidak ditransparansikan ke publik, jadi hanya pihak-pihak tertentu yang dapat terlibat kompetisi. Argumen tersebut tidak lagi relevan untuk negara otoriter yang tidak mempertimbangkan pendapat publik dalam melakukan relasi bisnis dan politik. Menurutnya, *rent-seeking* dapat disebut korupsi ketika pebisnis yang melakukan lobi membayar atau memberikan uang (secara pribadi) ke pejabat publik. Lain halnya ketika pebisnis mengeluarkan *cost* untuk

melakukan lobi, atau yang disebut dengan transfer *cost* seperti yang sudah dijelaskan di atas.<sup>102</sup>

Perilaku *rent-seeking* yang digolongkan sebagai tindak korupsi dapat dikaitkan dengan sistem pasar yang monopoli. Pada sistem pasar tersebut, sumber daya negara dikuasai oleh pihak tertentu untuk kemudian dikompetisikan siapa yang dapat mengelola atau mendapatkan sumber daya negara tersebut. Para pembuat kebijakan, dalam konsepsi *rent-seeking* akan meminggirkan kepemilikan publik di dalam pengalokasian sumber daya negara tersebut. Persoalan korupsi dalam kerangka *rent-seeking* tidak dapat sekadar dipahami apakah korupsi tersebut melanggar hukum, atau legal/ilegal, karena justru pejabat publik yang menciptakan hukum atau peraturan untuk melegalkannya.<sup>103</sup>

Dalam literatur ekonomi politik, konsep rent seeking dianggap sebagai perilaku negatif. Asumsi yang dibangun adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki, misalnya lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Di sinilah timbul masalah. Jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Menurut Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak besar karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Lambsdorf, Johann Graf. "*Corruption and Rent Seeking*", Public Choice, Vol 13. No. 1/ 2, Oktober 2002.

<sup>103</sup> Ratnia Solihah "*Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking*", Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Vol. 1, No. 1, Maret 2016: hal. 41-52.

<sup>104</sup> Yustika, Ahmad Erani, "*Ekonomi Kelembagaan*". Malang: bayu Media Publishing, 2006.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka praktik *rent-seeking* dapat dilihat sebagai perilaku yang berusaha menerapkan praktek monopoli terhadap sumber daya dan praktek melobi pemerintah/penguasa dalam upaya mendapatkan perlindungan, konsesi serta mendapatkan hak guna sumber daya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa ada banyak modus dalam melancarkan tindakan melawan hukum melalui praktek *rent-seeking* yang bermuara pada tindak pidana korupsi, salah satunya dengan melakukan praktek *mark up* pada anggaran pembangunan.

#### **b). Sistem *Lump Sum* dalam Kontrak Pembangunan**

Kontrak *lump sum* merupakan jenis kontrak yang lazim digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pelaku proyek sangat mengenal jenis kontrak ini. Pelaku proyek dengan gaya bebas tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam mempersepsikan kata “*fixed price*” dan kalimat yang tertera pada definisi *lump sum* yaitu “segala resiko ditanggung oleh Penyedia Jasa”. Persepsi bebas mengenai “*fixed price*” diasumsikan bahwa harga tidak boleh diubah sama sekali walau apapun yang terjadi. Sedangkan untuk kalimat “segala resiko ditanggung oleh Penyedia Jasa” dipersepsikan liar bahwa segala risiko apapun itu termasuk terjadi perubahan atas permintaan pemberi tugas atau penyempurnaan *design* agar bangunan berfungsi lebih handal, menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Perselisihan mengenai kontrak *lump sum* tidak berhenti sampai di situ. Ada panitia lelang mengatakan bahwa dalam kontrak *lump sum* hanya boleh pekerjaan kurang dan tidak boleh ada pekerjaan tambah.<sup>105</sup> Dalam hal ini, Muhammad Aris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan:

---

<sup>105</sup> Manajemen Proyek Indonesia, *Kontrak Lump Sum yang Benar Itu (Berdasarkan Referensi) Adalah...*, <http://manajemenproyekindonesia.com/?p=824>, 1 September 2018.

*“ Jadi dek banyak orang yang salah paham, banyak yang mengira bahwa pembangunan pasar ini cacat dan tidak layak. Padahal kami melakukan pekerjaan dengan serius. Cuma memang, dalam kontrak ini dalam menentukan harga itu menggunakan sistem lump sum, artinya apa, ini saya kasi contohki dek nah, kita menganggarkan pintu pasti kita kasi masuk daun pintu, kunciannya, rangkanya dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita terlalu tidak membutuhkan kunciannya maka anggarannya itu dialihkan ke hal yang lain, jadi begitu dek ”<sup>106</sup>*

Menurut peneliti, dari hasil wawancara dan kajian literatur mengenai kontrak *lump sum* semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa (resiko yang cukup besar) sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Kontrak ini memberikan perlindungan maksimum kepada *owner* pada biaya total proyek. Resiko biaya bagi pengguna jasa minimal (kecil) memberi cukup pengawasan atas pelaksanaan dan pengikatan. Pemberi Tugas dan tingkat investasi yang dibutuhkan dapat ditentukan sejak awal. Penyedia jasa harus menambahkan sejumlah biaya untuk menutupi resiko-resiko kenaikan biaya/harga-harga. Dalam memperkirakan biaya pekerjaan kontrak harga pasti, penyedia jasa mengajukan penawaran dengan mempertimbangkan kondisi terburuk yang mungkin mempengaruhi biaya. Biasanya pengguna jasa membayar harga-harga pasti yang mengarah pada tingkatan-tingkatan maksimum biaya yang diantisipasi tidak pandang apakah biaya maksimum ini benar terjadi atau tidak. Jumlah harga akan bertambah dikarenakan penilaian resiko oleh pemborong. Profit yang ditargetkan penyedia jasa adalah sekitar 6-12% dari biaya proyek. Dalam Perpres 16 tahun 2018 Perubahan kontrak tidak membatasi untuk kontrak *lump sum* sebagaimana

---

<sup>106</sup> Muhammad Aris, PPK Pembangunan Pasar Bonto Bahari, wawancara, Kantor DISPERINDDAG, Bulukumba, 11 April 2018.

dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (pasal 87 ayat 1a).

Dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 54:

- (1) *Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a.menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b.menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c.mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d.mengubah jadwal pelaksanaan.*
- (2) *Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.<sup>107</sup>*

Menurut peneliti, jika kontrak *lump sum* pekerjaan konstruksi berubah karena kondisi lapangan, lantas bagaimana menilai perubahan harga kontrak ? Menurut peneliti, perlu kehati-hatian jika kontrak *lump sum* dapat diubah, sebab jika PPK dan panitia peneliti kontrak tidak mampu maka dapat berpotensi kerugian negara. Seperti dalam pembangunan pasar Rakyat Bonto Bahari, ada perubahan lingkup dan *design* dalam rangka efisiensi atau optimalisasi fungsi bangunan (tergantung justifikasi perubahannya). Sebagaimana diketahui dalam kontrak *lump sum* tidak wajib menyampaikan analisa harga satuan. Dalam hal kontrak *lump sum* apabila terjadi perubahan lingkup akibat adanya perubahan *design* maka harus dibuka analisa harga satuan terhadap item-item yang mengalami perubahan, kemudian disandingkan dengan analisa harga satuan pekerjaan perubahan. Apabila jenis pekerjaan awal dengan pekerjaan yang

---

<sup>107</sup> Manajemen Proyek Indonesia, *Kontrak Lump Sum yang Benar Itu (Berdasarkan Referensi) Adalah...*, <http://manajemenproyekindonesia.com/?p=824>. 1 September 2018.

perubahan jenisnya sama (misal konstruksi baja semula menggunakan H beam dengan ketebalan 300 mm dirubah/di efisienkan menggunakan H beam 250 mm) maka analisisnya menggunakan analisa yg sama hanya harga satuan dasarnya yg dirubah). Namun apabila jenis konstruksinya yg berubah (misalnya dari konstruksi baja dirubah menggunakan beton), maka analisa harga satuan baja ditampilkan bersama dengan analisa konstruksi beton dalam 1 tabel sehingga akan dilihat adanya perubahan (efisiensi/optimalisasi) dari penggunaan alternatif metode dari struktur baja dengan struktur beton. Perubahan-perubahan tersebut harus dibuatkan justifikasi dgn lampiran *design notes/calculation*. Alasan perubahan biasa dari aspek kekuatan struktur (*strengths*), aspek *esthetic/arsitektural* atau alasan efisiensi. Perubahan design ini memang harus dilakukan oleh yang benar-benar ahli karena cenderung menjadi peluang atau di eksploitasi oleh penyedia.

Jadi menurut peneliti, penyedia baiknya lebih memilih menggunakan kontrak harga satuan, karena sering dari sisi pengguna masih menginginkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kontrak dan dari sisi penyedia ada peluang tidak bisa memenuhi dalam pelaksanaan kontrak karena sebab-sebab tertentu seperti bahan tidak ada dan sebagainya. Sedangkan disisi lain, menurut peneliti bila memang memerlukan perubahan kontrak maka agar dilakukan dalam kewajaran harga dan mencegah adanya kerugian negara.

Terjadinya kerugian negara atau adanya temuan kerugian negara sepanjang tidak diiringi adanya intervensi, kolusi, suap dan sebagainya, maka agar dikembalikan ke negara (bukan tindak pidana korupsi). Sehingga Dalam kasus

proyek pembangunan, perusahaan yang mengerjakan proyek melakukan penyusunan anggaran dengan menambah besaran anggaran yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal yang di dapatkan dari pemerintah selaku pihak yang mengerjakan bangunan. Seperti dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, praktek *mark up* sangat berpotensi hadir karena beberapa konstruksi bangunan yang tidak layak akibat penggunaan anggaran yang tidak maksimal. Andi Baliraja pun angkat bicara mengenai hal tersebut:

*“Sewaktu saya aksi, saya selalu suarakan itu bahwa laporan saya, tuntutan saya itu bahwa ada mark up, kira-kira rasional tidak, anggaran yang 5,6 milyar hanya menghasilkan bangunan seperti itu, tinggi pondasi rendah, sekarang sudah hujan itu air masuk karena lebih tinggi ruas jalan dari pada pondasi, los juga masuk air karena konstruksi bagian atas itu tidak bagus atau tidak tepatsehingga saat hujan turun masuk air kedalam los. Tanpa bertanya kepada ahli konstruksi bangunan, kita bisa mengetahui mana konstruksi yang baik dan mana yang tidak baik karena kenyataannya dilapangan memang demikian. Temuan saya di lapangan itu, berdasrkan laporan masyarakat ada bangunan itu yang tidak di gali pondasinya, timbunannya saja bercampur dengan sampah dan itu diambil dari tanah yang ada di samping lokasi pasar yang bercampur dengan sampah, dan itu terbukti dengan adanya keretakan pada beberapa dinding kios pasar, mungkin karena bahan campurannya yang tidak bagus atau seperti apa.”<sup>108</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menganggap bahwa dugaan terjadinya *mark up* dalam sistem *lump sum* akan lebih berpotensi besar dengan pertimbangan bahwa ada beberapa konstruksi bangunan yang tidak layak karena adanya upaya meminimalisir anggaran salah satunya dengan memanfaatkan tumpukan sampah yang bercampur dengan tanah yang tersedia di pinggir pasar, sehingga tidak perlu anggaran untuk pembelian bahan bangunan seperti tanah

---

<sup>108</sup>Andi BaliRaja, Aktivis Masyarakat, wawancara, Kel. Tanah Beru, Kab. Bulukumba, 6 Juni2018.

untuk timbunan pondasi bisa dikurangi. Konstruksi pondasi pun lebih rendah dari ruas jalan yang dapat mengakibatkan tergenangan air saat musim hujan di area pasar, tidak hanya itu keretakan pada beberapa badan bangunan kios juga mengindikasikan penggunaan materil bangunan, serta volumennya yang kurang sehingga mengakibatkan struktur bangunan menjadi mudah retak. Maka dari itu realisasi anggaran yang digunakan kemudian dipertanyakan.

### c). Lambatnya Proses Hukum

Pada kasus proyek pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, dimana laporan yang telah disampaikan masyarakat ke Kejati Kabupaten Bulukumba tidak menuai hasil hingga sampai saat ini, padahal Andi Baliraja sudah mengirim surat susulan mengenai sejauh mana perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejari dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Sikap pihak Kejari yang tidak kooperatif menimbulkan pertanyaan besar dibenak masyarakat, mengingat sudah satu tahun yang lalu laporan itu dikirim tapi hingga kini tidak ada hasil yang diterima dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Bulukumba. Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Andi Baliraja, yaitu sebagai berikut:

*”Saya sudah mengirim surat ke Kejati tapi sampai sekarang tidak ada titik terang, kayaknya di diamkanji ini kasus. Sekarang saya tinggal seorang diri mengusut ini kasus, padahal sebelumnya ada 21 orang anggota masyarakat yang ikut menolak hasil pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari, dan belakangan ini saya liat mereka satu persatu sudah menempati los-los dan kios yang ada dipasar, makanya saya heran, ada apa ini?, tapi meskipun sendiri saya akan tetap usut ini kasus bagaimanapun caranya, seandainya ada danaku saya bawa ini laporan ke KPK karena saya yakin kalau ini pembangunan pasar memang tidak beres”.*<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Andi BaliRaja, Aktivis Masyarakat , Bulukumba, wawancara oleh penulis di Rumah Beliau, Tanah Beru, Bulukumba, 6 Juni 2018.

Selain Andi Baliraja, sudah ada 21 orang yang menandatangani petisi penolakan hasil Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Mendengar apa yang telah disampaikan pihak pelapor, peneliti menganggap bahwasannya kasus ini sengaja dibiarkan tanpa ada kejelasan. Dapat dilihat bahwa, saat ini kekuasaan sedang berdiri gagah di hadapan masyarakat yang tak berdaya. Namun dibalik itu semua akan selalu ada sosok yang memegang teguh idealisme di tengah dominasi berkuasa kaum pemburu rente. Pembangunan yang dianggap sebagai sebuah kebaikan, telah mengadung stigma negatif dan bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, jika perburuan rente yang bermuara pada tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan anggaran, bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya. Meskipun jalur hukum belum juga dibuka, namun dari sikap penegak hukum yang tidak tegas dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa menyimpulkan bahwa Kejari Kabupaten Bulukumba bersikap tidak kooperatif. Hal ini pun menuai protes dari Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bulukumba serta ormas yang berhimpun, menuntut Kajari Bulukumba di copot dari jabatannya.



**Gambar 4.3.1**  
**Gambar Aksi Demonstrasi**



*Sumber: suaralidik.com, Bulukumba.*

Berdasarkan kutipan dari berita media online *LidikPro.com*, aksi demo yang digelar rabu, 9 mei 2018 yang berdurasi kurang lebih 2 jam ini merupakan aksi demo lanjutan pekan lalu yakni menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) M Ikhsan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menuntaskan sejumlah kasus yang ditanganinya. Koordinator aksi demo Iwan Gallarang menyuarakan dengan nada keras *“Kejaksaan Bulukumba tajam ke bawah, namun tumpul keatas. Hanya mampu menyelesaikan kasus kecil. “Korupsi menghancurkan daerah, menyengsarakan rakyat,”* Tegas mantan ketua HMI Bulukumba ini. Sementara itu, Ketua Investigasi Lidik Pro Harianto Syam yang ambil bagian sebagai orator, menilai jika Kajari Bulukumba bersipat pengecut lantaran terindikasi meninggalkan tempat dengan sengaja. Aksi demo pekan lalu sudah disampaikan dengan sangat jelas jika Lidik Pro bersama KNPI dan ormas lainnya akan kembali gelar aksi demo yang sama. Pada aksi demonstrasi yang digelar ketua Investigasi LSM Lidik Pro, Harianto syam dalam orasinya pekan

lalu menantang pihak Kajari Kab.Bulukumba untuk berdebat secara terbuka terkait kasus yang disebutkan pihak Kajari yang katanya sudah dituntaskannya yang justru menimbulkan tanda tanya besar oleh demonstan.<sup>110</sup>

Ada beberapa kasus yang belum diselesaikan di Kejari Kab. Bulukumba, salah satunya adalah kasus terkait dugaan *mark up* anggaran pada pembangunan Pasar Rakyat Bonto Baharai. Seperti yang di kutip pada media online suaralidik.com, demonstan mengatakan bahwa “*Kami akan menuntaskan kasus Tahura, Dana Desa, Pasar Bontobahari dan beberapa kasus lainnya dalam waktu dekat ini, kami akan menjadikan tersangka kepada pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut*” tegas Kasi Pidum kejari Bulukumba. Ditempat yang sama, Ketua Lidik Pro DPC Bontobahari Andi Bali Raja yang ikut serta dalam aksi demo, menyerahkan dokumen laporan pasar Bontobahari yang dinilai menyalahi bestek. Andi Bali raja berharap, dengan dokumen laporan ini bisa membantu pihak kejari Bulukumba mengungkap kasus pasar Bontobahari yang masih status mandet. “*khusus kasus pasar Bontobahari, saya serahkan bukti-bukti baru ke pihak Kejari Bulukumba dan saya berharap bisa menjadi referensi tambahan dalam mengungkap kasus pasar Bontobahari yang masih mandet ini*” ucap Andi Bali raja kepada media. Demonstan yang terus menyuarakan ketidakpuasannya dengan kinerja Kejari Bulukumba secara serentak meneriakkan agar Kajari Bulukumba M Ikhsan mundur saja dari jabatannya.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Pantuan langsung suaralidik.com, *Aksi Demonstrasi*, Kejari Kab.Bulukumba, Rabu 9 mei 2018.

<sup>111</sup> Pantuan langsung suaralidik.com, *Aksi Demonstrasi*, Kejari Kab.Bulukumba, Rabu 9 mei 2018.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyeldikan Kejari Kabupaten Bulukumba, Andi Baliraja sempat mengirim surat ke Kejari pada tanggal 22 mei 2017 perihal progresifitas penyelidikan mengenai laporan yang di kirim pada tanggal 13 Maret 2017. Andi Baliraja mempertanyakan perihal sejauh mana perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bapak dalam penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Pembangunan Pasar Pedesaan Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba, sejauh mana tindakan pihak Kejari Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelidikan dalam menangani kasus tersebut, serta dasar dan alasan apa yang menjadi pertimbangan penyidik kejaksanaan sehingga tidak melakukan tindakan Hukum bahkan terkesan melakukan pembiaran. Meskipun Kasus ini tidak tergolong kasus berat, nampaknya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksanaan Negeri Kab. Bulukumba belum dapat memberikan langkah dan jawaban yang tepat kepada pihak pelapor.

Andi Baliraja mengharapkan agar adanya pernyataan secara tertulis mengenai perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksanaan Negeri Kab.Bulukumba, dan segera mungkinmelanjutkan laporan yang telah disampaikan diproses hukum sampai ada kepastian hukum.

#### ***D. Dampak Praktek Rent Seeking terhadap Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari***

Pasar tradisional yang diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli maupun pembeli dengan pembeli memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Kecamatan Bonto Bahari, pasar menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah, dimana segenap potensi ekonomi ril masyarakat tumbuh dan bergereak di

dalam pasar. Keberadaan pasar Rakyat Bonto Bahari sebagai pasar tradisional memberikan dampak dari segi ekonomi karena berperan dalam membuka lapangan kerja secara luas dan menciptakan pendapatan bagi sebagian pekerja pendapatan rendah. Sehingga implikasinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Upaya pendapatan pun dilakukan dengan kerja keras untuk efektifitas pengelolaan retribusi karena masih konvensional dan sistem berjalan. Pasar menjadi salah satu sarana yang dapat menambah pendapatan daerah, pasar Rakyat Bonto Bahari yang menyediakan kebutuhan harian membuat masyarakat jauh lebih diuntungkan karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah dan terjangkau dalam waktu yang singkat.

Sudah selayaknya pasar mendapatkan perhatian dari pemerintah, agar kenyamanan transaksi jual beli dapat terjamin dengan baik. Namun akibat kegagalan konstruksi bangunan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, seperti bangunan kios yang mengalami keretakan yang berpotensi mencederai pemilik kios maupun orang yang sedang berbelanja jika suatu saat bangunan kios runtuh akibat keretakan pada hampir setiap dinding bangunan kios pasar yang disinyalir karena bahan campuran bangunan yang kurang baik. Tidak hanya itu, tinggi pondasi yang ukurannya kurang dari 50 cm di atas permukaan jalan, ditambah lagi dengan saluran drainase yang tidak mempunyai titik pembuangan akhir yang jika saluran tersebut penuh akan mengakibatkan luapan air di area pasar yang berpotensi mengakibatkan banjir, jika suatu saat hujan turun dan menambah volume air di area pasar. Dengan kondisi yang demikian dapat membuat kenyamanan dalam transaksi jual beli terganggu, bahkan sampai menghentikan aktivitas transaksi jual beli di pasar dan pada akhirnya berdampak pada penghasilan para pedagang pasar. Pada wawancara peneliti bersama salah

satu pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari, yang akrab dipanggil Ajus, dia mengatakan bahwa:

*“Saya disini sudah cukup lama, awalnya saya membantu orang tua saya berdagang dan sekarang saya bisa punya usaha sendiri di pasar ini. Kalau dilihat memang bangunan pasar ini masih ada kekurangan, harusnya ada pagar, tinggi pondasinya juga harusnya lebih tinggi dari jalan supaya tidak masuk air, ini juga saluran airnya adaji tapi tidak ada pembungan akhirnya, jadi kalau saluran air sudah penuh air akan meluap keatas. Tapi, ya mau bagaimana lagi, mau tidak mau kita tetap berdagang disini meskipun keadaannya seperti ini. Ada juga yang menolak menempati kios karena persoalan pajak yang terlalu mahal katanya”.*<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti beranggapan bahwa, memang pedagang merasakan adanya kekurangan dalam pembangunan yang sebenarnya dengan anggaran yang lumayan besar bisa membangun pasar yang berkualitas, apalagi Pasar Rakyat Bonto Bahari merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kab. Bulukumba, yang beroperasi setiap hari. Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari juga tercatat sebagai pasar yang retribusi pajaknya selalu mencapai target. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, yang menyatakan bahwa:

*“Pasar Bonto Bahari sebagai salah satu pasar yang beroperasi setiap hari dan terbilang sebagai pasar yang cukup besar, dalam hal pembayaran pajaknya selalu tepat waktu dan mencapai target pembayaran setiap tahunnya, mengalahkan beberapa pasar besar yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ini sangat bagus karena menunjang pendapatan daerah, saya rasa pasar Bonto Bahari memang layak mendapatkan perhatian terhadap pemerintah dan bisa menjadi contoh bagi kecamatan yang lain”.*<sup>113</sup>

Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan pasar yang tidak sesuai harapan dan dapat mengancam keselamatan pedagang, harusnya para

<sup>112</sup>Ajus, (26), Pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari,, wawancara, Pasar Rakyat Bonto Bahari, Kec. Bonto Bahari, tanggal 6 Agustus 2018.

<sup>113</sup>Pegawai Badan Pendapatan Daerah, wawancara, Kantor BAPENDA Kab. Bulukumba, Bulukumba, 15 April 2018.

pedagang mendapatkan fasilitas yang memadai untuk berdagang, apalagi kegiatan berdagang dipasar juga menjadi penghasilan pokok keluarga dan pasar juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari, dan bagi pemerintah pasar menjadi salah satu instrument pendapatan daerah melalui retribusi pajak tahunan, bulanan dan harian.

Pembangunan ekonomi dapat terbentuk dengan adanya dukungan dari faktor-faktor lain yang menyokongnya. Salah satu proyek strategis untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia adalah pembangunan pasar. Pembangunan pasar yang baik dan tepat akan melancarkan aktivitas ekonomi, seperti kegiatan jual beli, distribusi pendapatan, akses terhadap kebutuhan pokok, dan sebagainya. Begitu pentingnya pasar untuk keberlangsungan pembangunan, maka pemerintah juga serius dalam pengadaan. Namun pembangunan pasar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri misalkan dengan swakelola namun diperlukan adanya kerja sama pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan tersebut, maka diadakanlah pelelangan yang terbuka bagi penyedia swasta. Akan tetapi pembangunan pasar masih menimbulkan biaya-biaya lain selain biaya produksi itu sendiri yaitu biaya transaksi. Untuk menutupi potensi kerugian dari biaya transaksi dan tetap memperoleh keuntungan, maka penyedia akan melakukan berbagai cara, bahkan melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti pelobian yang berujung pada persaingan tidak sehat dan juga korupsi anggaran. Namun penyedia perlu dukungan dari penyelenggara untuk melancarkan kecurangannya tersebut.

Program membangun pasar yang menjadi salah satu agenda besar dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama satu periode disambut baik oleh pemerintah daerah, karena selain masih ada beberapa daerah yang hanya memiliki beberapa pasar saja, juga terdapat beberapa pasar yang membutuhkan renovasi

atau perbaikan bangunan pasar, seperti halnya kondisi pasar yang ada di Kecamatan Bonto Bahari. Pasar Bonto Bahari mendapatkan bantuan dana alokasi khusus untuk renovasi pasar secara menyeluruh, dapat dikatakan pembangunan kembali dengan anggaran pembangunan yang cukup besar yaitu sekitar 5,6 Milyar. Hal ini sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun setelah pembangunan dilakukan masyarakat mendapatkan temuan berupa kegagalan konstruksi bangunan pasar yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena tidak maksimalnya pengerjaan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Tentunya pemerintah Kabupaten Bulukumba menuai sorotan terkait adanya temuan berupa kegagalan konstruksi bangunan yang mengalami keretakan hampir 70% pada dinding kios pasar.

Hal ini perlu ditanggapi dengan baik agar pembangunan sebagai suatu upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud, alih-alih pembangunan yang dianggap dapat menopang kesejahteraan bagi masyarakat, kini menjadi lahan bisnis bagi segelintir pengusaha yang hanya memetingkan individu dan kelompok tertentu dan merugikan negara akibat perbuatan melanggar hukum.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pola *Rent-Seeking* dalam Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari ditunjukkan dengan adanya relasi kuasa dan bisnis yang melibatkan pengusaha dan politisi lokal yang dapat mempengaruhi kemenangan tender proyek Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Dengan adanya hubungan pengusaha dengan pihak ketiga yang memiliki relasi dalam pemerintahan mengindikasikan adanya upaya untuk memenangkan tender proyek dengan persaingan yang tidak sehat antara perusahaan/penyedia jasa konstruksi bangunan yang menjadi peserta tender proyek Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek dapat membuat semakin banyaknya biaya transaksi sehingga pengerjaan proyek secara maksimal bukan lagi menjadi orientasi utama, melainkan seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan. Tidak optimalnya penggunaan anggaran ditunjukkan dari hasil pembangunan dengan kualitas bangunan yang rendah yang sampai mengalami keretakan pada dinding bangunan sebelum di resmikan, kemudian desain saluran drainase yang tidak ideal, pondasi yang tidak memenuhi standar karena lebih rendah dari pada jalan, sehingga dapat menimbulkan banjir saat musim hujan, padahal anggaran yang digunakan sebesar Rp.5.654.063.000, ini menunjukkan adanya potensi yang besar terjadinya praktek *rent-seeking*. Masyarakat yang mengatasnamakan diri aktivis masyarakat telah melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan RI Kab. Bulukumba, namun sudah lebih dari satu tahun penyelidikan tersebut belum juga menuai hasil.

2. Dampak dari adanya praktek *rent seeking* terhadap pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari yaitu hasil pembangunan pasar yang tidak baik, dengan konstruksi bangunan yang dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna pasar, baik yang menempati kios maupun menempati los dan para pengunjung pasar yang hendak berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Bonto Bahari karena pekerjaan penyedia jasa konstruksi yang tidak rampung, seperti pemasangan instalasi listrik, desain drainase yang tidak ideal, struktur bangunan dinding yang retak-retak dan tinggi pondasi yang lebih rendah dari ruas jalan. Ini tentunya tidak berbanding lurus dengan retribusi yang dibayar oleh para pedagang pertahun, perbulan bahkan yang membayar retribusi harian karena berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah, pedagang Pasar Rakyat Bonto Bahari tercatat sebagai salah satu pasar yang pembayaran retribusinya selalu mencapai target.

#### **B. Implikasi**

Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu politik khususnya kajian praktek *rent-seeking* yang terjadi di ranah lokal agar fenomena yang ditemukan oleh peneliti terus dikembangkan sehingga dapat memajukan kehidupan berdemokrasi kearah yang lebih baik.

Melalui kajian terhadap praktek *rent-seeking* kita dapat melihat lebih luas lagi dinamika politik lokal yang terjadi di ranah lokal yang jelas akan mempengaruhi tatanan politik nasional. Kajian terhadap praktek *rent-seeking* tidak semestinya hanya menjadi kajian yang terpinggirkan oleh kajian-kajian

politik lainnya, sehingga ini dapat dikembangkan dan semestinya memberikan stimulus kepada pemerhati dan peneliti untuk mengeksplorasi kajian ini.

Wacana terhadap praktek *rent-seeking* mestinya dilihat sebagai sebuah wacana untuk menciptakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan sosial dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keseimbangan hidup yang di cita-citakan. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mestinya mampu membangun sinergitas antar elemen masyarakat demi pembangunan yang memanusiakan manusia, bukan malah menghadirkan eksploitasi yang menguntungkan kelompok dan atau individu tertentu tanpa memikirkan dampak negatif seperti yang terjadi pada polemik pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Isu yang harus dicermati oleh politisi, peneliti, pemerintah, legislatif adalah isu mengenai pembangunan yang mengorbankan dan merugikan masyarakat dan bahkan dapat merugikan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al Hakim, Ikhsannudin, *Reent-Seeking Dan Korupsi Dalam Pemangunan Jalan Di Indonesia*” (Studi Kasus Dua Masa Pemerintahan SBY, 2004-2013), Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2015.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abual-Hasan al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz 4 (Cet. V; Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi), h. 2013. Lihat juga Muhammad Mahyu al-Din ‘Abd al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, Juz 4 (Cet. IV; Beirut: Maktabah al-‘Asriyah).

Aidt, Toke S., *Economics Analysis of Corruption: The Economic Journal*, Vol. 113 No. 491, November 2003.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet.II, Jakarta; Fajar Inter Pratama Offset, 2008.

Criyanto, Rahmat, *Teknik Penulisan Riset Komunikasi*, Jakarta; Kencana.2009.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Kencana.2010.

Departemen Keuangan, Diakses di <http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=341> pada 3 Oktober 2017 pukul 20.32 WITA

Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Efriza, *Kekuasaan Politik*, Malang; Intrans Publishing, 2016.

[Http://rakyatku.com/tag/pemkab-bulukumba/?url=63103/2017/08/28/inspektorat-bulukumba-teukan-pembangunan-pasar-bonto-bahari-bermasalah](http://rakyatku.com/tag/pemkab-bulukumba/?url=63103/2017/08/28/inspektorat-bulukumba-teukan-pembangunan-pasar-bonto-bahari-bermasalah)

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Perkasa, 2005.

Kecamatan Bonto Bahari dalam Angka 2017, “*Situs resmi Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba*<https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2017/09/20/f20acd59e10743f887d57f86/kecamatan-bonto-bahari-dalam-angka-2017.html>. (23 April 2018).

Ma’arif, Syamsul, “*Rent Seeking Behaviour*”, *Artikel*, Universitas Lampung, 2015.

Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hill, CA: Sage Publications, 1984).

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fa>, *Al-Jami’ Al-Musnad*, Cet.I; PT Da>ru Tufa An-Ja, 2016.

- Nuryanto, Ilham . *Perburuan Rente dan Korupsi Pada Sekrot Properti Di Kabupaten Bogor*, Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Rachbini, Didik J. *Ekonomi Politik Kelembagaan: Mencari Jawaban Atas Krisis Ekonomi dan Politik*, dalam *Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol. 4 No. 3
- Riyanto, *Korupsi Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya*, Disertasi, Pascasarjana IPB, 2008.
- Saleh Tajuddin, Muhammad. *Jurnal Diskursus Islam: Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas Hobbes*, Volume 1 Nomor 1, April 2013.
- Sijabat, Emma P, *Yuridis Tentang Kontrak Konstruksi Antara DISPERINDAG Kab.Asahan Dengan PT.Menara Kharisma Internusa Medan” (Study Pada Proyek Pembangunan Pasar Kartini Kisaran)*.Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali pers, 1994.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; Kencana 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV.Alfaveta, 2008.
- Syamsuddin dkk, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, Ponorogo; Wade Grup, 2015.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan, dan Metodologi*, Yogyakarta; Fakultas Sosial dan Politik UGM, 1970.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1, Edisi 9. HarisMunandar, penerjemah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006. Terjemahan dari *Economic Development*.
- Utomo, Susilo, *Politik dan Wirausaha Fenomena “Rent Seeking” dan “ Client Businessmen” pada Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Demak Jawa-Tengah”*.Jurnal Universitas Diponegoro.
- Wijaya, Indra, *Evaluasi Dampak Pedagang Dari Proyek Pembangunan Pasar Ngarsopuro*. Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Yustika A.E, *Ekonomi Kelembagaan :Definisi, Teori, dan Strategi*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2008.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Ket.Wawancara dengan Andi Cawa Miri, ( Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kab.Bulukumba)**



**Ket. Wawancara dengan Andi Idham ( Pegawai Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kab.Bulukumba)**





**Ket. Wawancara dengan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba.**

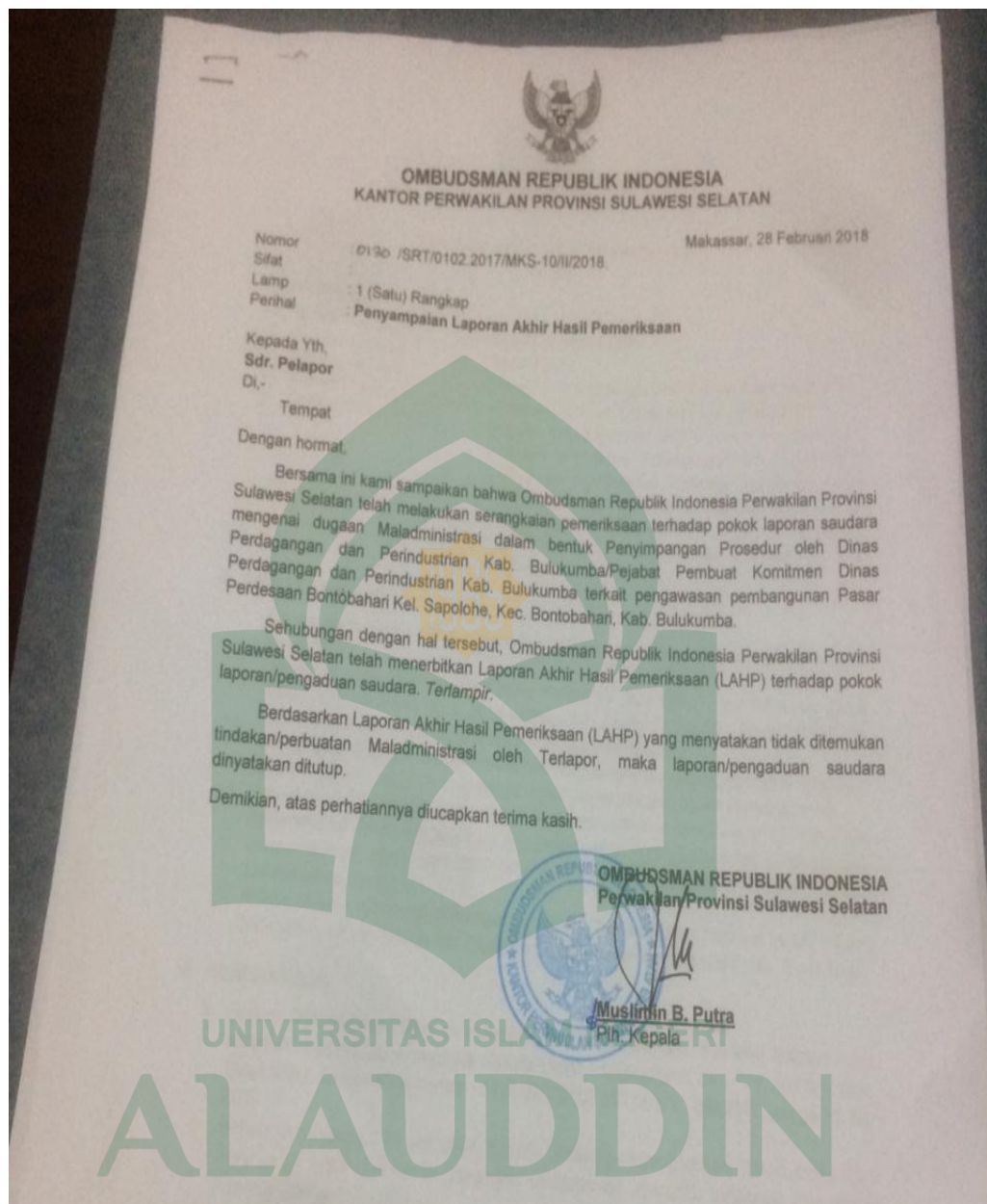


**Ket. Wawancara dengan Ajus (Pedagang Pasar Rakyat Bonto bahari)**





**Ket.Wawancara dengan Andi Baliraja ( Aktivis Masyarakat Bonto Bahari  
Sekaligus Pelapor )**



**Ket.Surat Rekomendasi Ombudsman tentang tidak adanya maladministrasi dalam pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari**

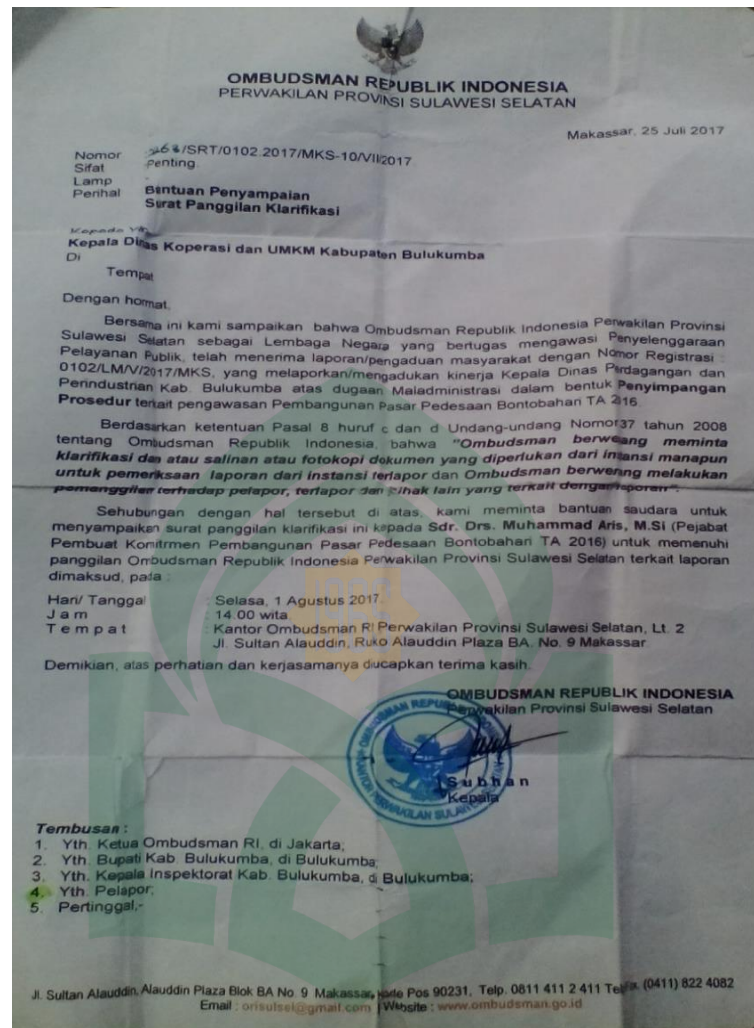


**Ket. Surat Balasan BPK terkait izin penelitian.**



**Ket.Dokumen Kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bahari.**





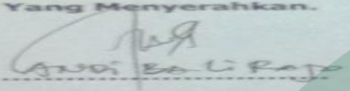
Surat perihal bantuan penyampaian surat panggilan klarifikasi Ombudsman perwakilan  
Provinsi Sulawesi Selatan.

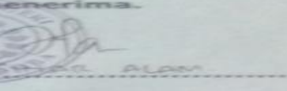
**KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA**  
Jl. Kumbutan No. 65 Telp (0413) 81005 - 81146 Bulukumba

**TANDA TERIMA SURAT**

**Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:**  
**Nama:** SIMBA ALAM  
**Alamat:** JL. RANGUTAN NO. 6  
**Pekerjaan:** PNS  
 Telah menerima Surat Laporan Aduan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Tentang : Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Pedesaan Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba.

Bulukumba, 13 Maret 2017

**Yang Menyerahkan.**  
  
 Andi Ba Li Raga

**Yang menerima.**  
  
 SIMBA ALAM

Tanda Terima Laporan masyarakat Bonto Bahari ke Kejaksaan Negeri Bulukumba.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Jl. A. P. Pettarani, Telp (0411) 85477 / 854988 Fax (0411) 854995, Makassar 90222

**TANDA TERIMA**

Pada hari ini Senin tanggal 03 April 2017, telah diterima surat :

Dari	Masyarakat Bontobahari Kab. Bulukumba
Nomor Surat	
Tanggal Surat	
Perihal	Laporan tentang Dugaan tindak pidana Korupsi

**Yang Menyerahkan**  
  
 Muhammad Huda

**Yang Menerima**  
  
 Muhammad Huda

Tanda Terima Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Masyarakat Bontobahari perihal Laporan dugaan tindak pidana korupsi.



Tanda Terima Surat Kejaksaan Tinggi Sulsel



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arfandi Mandala dilahirkan di Kelurahan Turungan Beru, Kecamatan Bontokamase, Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 1 Desember 1994. Anak kedua dari dua bersaudara hasil buah kasih dari pasangan Burhan Dg Nompo dan Halija.

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Negeri 128 Turungan Beru dan lulus pada tahun 2007. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bontobahari dan menyelesaikan studinya pada tahun 2010. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Bontobahari dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2013. Sejak SMA, penulis sudah aktif berorganisasi dengan masuk menjadi pengurus OSIS. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dan lulus di jurusan ilmu politik, fakultas ushuluddin dan filsafat.

Semasa kuliah penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan beberapa organisasi lainnya seperti Alauddin Debate Association dan Forum Komunikasi Masyarakat SMAGA Bulukumba (FKMSB). Penulis menyadari bahwa berorganisasi dan aktif berkompetisi sangat penting sebab merupakan bagian dari pengembangan wawasan keilmuan seorang mahasiswa. Tidak semua pengetahuan dapat diperoleh melalui bangku kuliah melainkan juga melalui pengalaman berorganisasi. Namun demikian bukan berarti hanya fokus berorganisasi dan melupakan tanggungjawab mahasiswa untuk kuliah. Jadi harus seimbang antara organisasi dan kuliah sehingga benar-benar meningkatkan kualitas dan kapasitas keilmuan kita selaku mahasiswa.